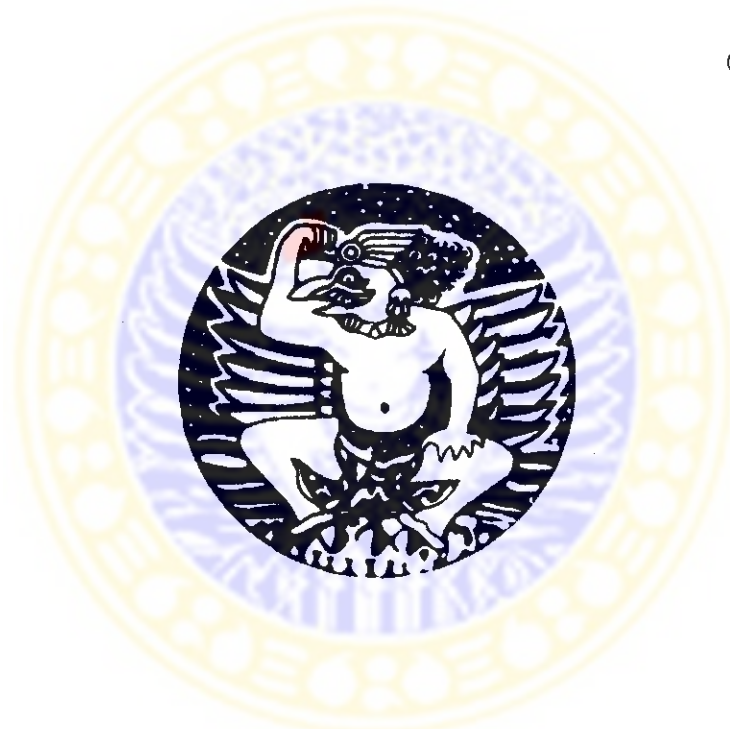


**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
DI INDONESIA PERIODE 1996 - 2003**

**SKRIPSI**

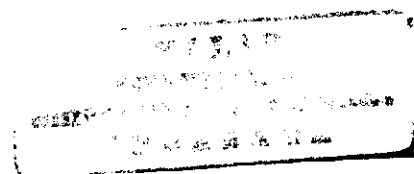
**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



C 45 00  
Put  
P

**DIAJUKAN OLEH  
RATIH DWIMBANTARI PUTRI  
No. Pokok : 040117160**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
DI INDONESIA PERIODE 1996 – 2003**

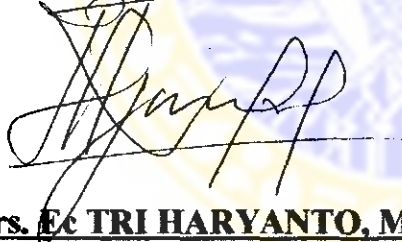
**DIAJUKAN OLEH :**

**RATIH DWIMBANTARI PUTRI**

**No. Pokok : 040117160**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Drs. Ec TRI HARYANTO, MP**

**TANGGAL.....** 29 JUNI 2006

**KETUA JURUSAN,**



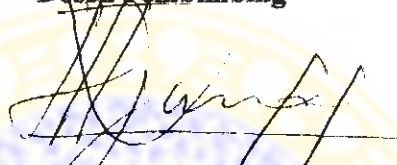
**Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, MSi**

**TANGGAL.....** 29 Juni 2006

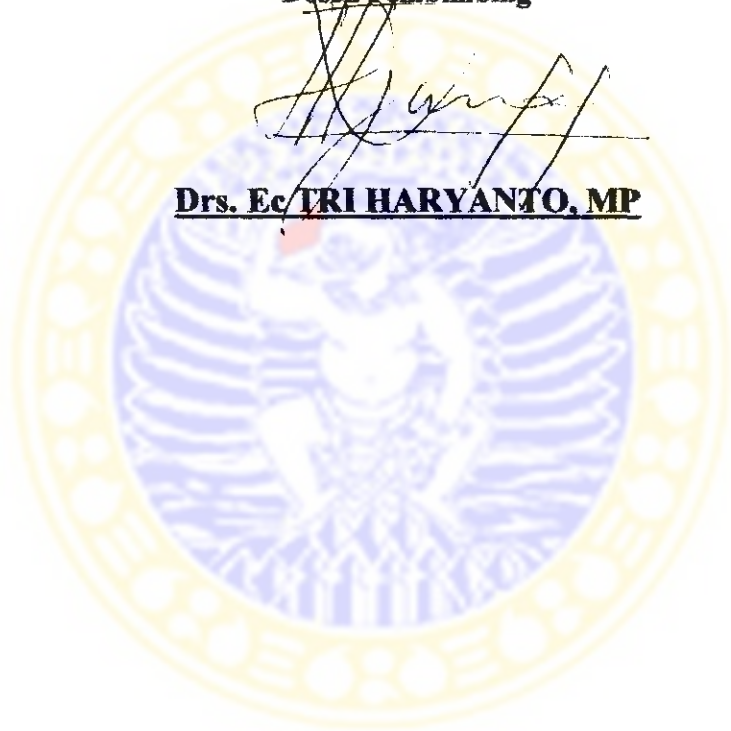
Surabaya,..... 24 MEI 2006

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. Ec TRI HARYANTO, MP**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA PERIODE 1996 – 2003" untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyak dukungan dan bantuan dari segala pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Drs. Ec. Tri Haryanto, MP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
2. Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroem, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Dra. Ec. Hj. Siti Umajah Masjkuri, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
5. Drs. Ec. Bambang Sunarno, selaku dosen wali penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

6. Kedua orang tua penulis Bapak Gatot Pudjianto dan Ibu Suprihatin serta masku Timur dan adikku Dimas, yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya yang tak terhingga. Semua Om dan tante penulis yang sudah memberikan bantuannya baik secara moril maupun materiil.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.



Surabaya, 21 Mei 2006

Penulis

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah empat variabel yaitu konsumsi pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, investasi swasta dan variabel *dummy* krisis ekonomi. Data yang digunakan adalah data panel dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1996-2003 menggunakan metode *Generalized Least Square*.

Perhitungan regresi menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, dan investasi swasta memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Konsumsi pemerintah merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar diantara variabel lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia selama periode penelitian.

Kata kunci : pengeluaran pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

The main object of this research are to estimate the relationship between government expenditure and economic growth, and analyze its impact on economic growth. This research included four variable those are, the government consumption, government investment, private investment, and dummy variable economy crisis. The data use in this research are panel data from 26 province in Indonesia during period 1996-2003. the method use is Generalized Least Square to estimate the regression model.

The regression result show that government consumption, government investment, private investment have positive and significant impact, whether partial or simultaneous to economic growth. Government consumption is the most available variable who has the biggest impact to economic growth in Indonesia during the research period.

*Keywords : government expenditure, private investment, economic growth*



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Model Pertumbuhan Endogen.....	9
2.1.3 Teori Pertumbuhan Harrod - Domar.....	11
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.1.5 Investasi pemerintah.....	19
2.1.6 Investasi Swasta.....	20
2.1.7 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	22
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	24
2.3 Hipotesis dan Model Analisis .....	26
2.3.1 Hipotesis .....	26
2.3.2 Model Analisis .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
3.2 Identifikasi Variabel .....	28
3.3 Definisi Operasional .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis.....	30
3.6.1 Uji Statistik.....	32
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37



4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia .....	37
4.1.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	39
4.1.3 Pertumbuhan Investasi Swasta Daerah.....	43
4.2 Hasil Perhitungan Regresi.....	45
4.3 Pembuktian Hipotesis .....	49
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	50
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan .....	62
5.2 Saran .....	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1996-2003 (Persen).....	38
Tabel 4.2	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 1996-2003 (Persen).....	40
Tabel 4.3	Pertumbuhan Investasi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 1996-2003 (Persen).....	42
Tabel 4.4	Pertumbuhan Investasi Swasta Daerah di Indonesia Tahun 1996-2003 (Persen).....	44
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Model Regresi.....	45
Tabel 4.6	Pembagian Propinsi Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Konsumsi Pemerintah Daerah di Indonesia.....	51
Tabel 4.7	Pembagian Propinsi Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah di Indonesia.....	54
Tabel 4.8	Pembagian Propinsi Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Investasi Swasta Daerah di Indonesia.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Estimasi Regresi dengan Metode GLS
- Lampiran 2 Tabel PDRB di Indonesia menurut Propinsi Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rp)
- Lampiran 3 Tabel Konsumsi Pemerintah Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996-2003 (Juta Rp)
- Lampiran 4 Tabel Investasi Pemerintah Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996-2003 (Juta Rp)
- Lampiran 5 Tabel Investasi Swasta Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996-2003 (Juta Rp)
- Lampiran 6 Data Input Regresi
- Lampiran 7 Tabel Distribusi  $t$  ( $\alpha = 10\%$ )
- Lampiran 8 Tabel Distribusi  $F$  ( $\alpha = 10\%$ )

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kontribusi dari sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi perdebatan yang sengit diantara para ahli ekonomi pembangunan. Pendapat para ahli mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan efek pada pertumbuhan melalui “crowding out” dari investasi pemerintah yang efisien dan potensial.

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi pada infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pembangunan memberikan efek yang positif pada pertumbuhan melebihi produktivitas dari investasi swasta. Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung mendorong pertumbuhan dengan cara peningkatan ekonomi melalui permintaan agregat dan juga mempengaruhi keuntungan dimasa yang akan datang pada sektor swasta. Meskipun demikian pengeluaran pemerintah dapat menjadi tidak produktif apabila ‘*excessive*’.

Lindhaur dan Valenchik (1992) menyatakan pentingnya hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan terutama di negara-negara sedang berkembang yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu. Kondisi ini kemudian cenderung dihubungkan dengan semakin meningkatnya defisit fiskal yang pada akhirnya menimbulkan efek berkebalikan terhadap pertumbuhan, sebagaimana hasil studi yang dilakukan Kneller et al (1998) di negara-negara yang tergabung dalam OECD.

Pada Makro ekonomi Keynesian secara tradisional, banyak macam dari pengeluaran pemerintah bahkan yang secara alamiah dapat memberikan kontribusinya pada pertumbuhan otonomi. Konsumsi pemerintah tingkat tinggi dapat meningkatkan tenaga kerja, keuntungan, dan investasi melalui efek multiplier dari permintaan agregat. Diamond (1989) menyatakan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga output bergantung pada ukuran dan keefektifan dari multiplier pengeluaran pemerintah yang dapat menstimulus perekonomian jangka pendek dan mengurangi akumulasi modal pada jangka panjang. Secara khusus crowding out menghasilkan dari defisit fiskal dan efek gabungan dari interest rate, namun secara umum pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi perekonomian.

Aktivitas pemerintah secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan total output sebagaimana dikemukakan Lin (1994). Aktivitas tersebut antara lain mencakup penyediaan barang publik, infrastruktur, dan jasa-jasa sosial. Menurut Barro (1990), investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah pada aktivitas-aktivitas produktif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat memperlambat pertumbuhan.

Bagaimanapun juga, secara empiris sulit membedakan pengeluaran pemerintah antara pengeluaran yang termasuk kategori investasi atau konsumsi. Demikian juga dari banyak studi yang dilakukan ternyata tidak ada bukti yang konsisten hubungan baik secara positif maupun negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Kweka dan Morrissey (1999) di Tanzania menunjukkan hubungan yang negatif antara konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk investasi swasta

menunjukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania. Studi lainnya yang dilakukan oleh Ibrahim (2000) di Malaysia mengenai pengaruh investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita di Malaysia menunjukkan hubungan yang positif antara investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi perkapita, sedangkan untuk investasi pemerintah menunjukkan hubungan yang negatif. Studi yang dilakukan Folster dan Herkeson (1999) di negara-negara OECD menghasilkan hubungan yang negatif, sebaliknya studi yang dilakukan oleh Agell et al (1999) menunjukkan tidak terdapatnya hubungan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut Grier dan Tullock (1989) menyatakan bahwa hubungan aktual antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan tidak mudah dipahami dan membutuhkan pembuktian empiris lebih jauh.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sampai saat ini masih merupakan subyek analisis yang penting dan menarik untuk didiskusikan. Secara umum, terdapat pandangan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya pada infrastruktur fisik atau modal manusia akan cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu meskipun adakalanya peningkatan relatif lambat. Pengeluaran pemerintah mungkin secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan output melalui interaksinya dengan sektor swasta. Terlepas dari pro dan kontra tentang hasil berbagai penelitian tentang hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, apakah kecenderungan tersebut juga terjadi pada perekonomian Indonesia, khususnya pada pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, hal ini masih merupakan pertanyaan terbuka yang masih perlu dibuktikan.

Maka berdasarkan bahasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan suatu studi empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1996-2003. Adapun faktor-faktor yang perlu dikaji adalah pengeluaran pemerintah daerah dan investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan data panel, yaitu data *time series* dan data *cross section*. Periode waktu yang digunakan memungkinkan penulis untuk menggunakan *variabel dummy* krisis ekonomi karena berkisar antara tahun 1996-2003 dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Data *cross section* yang digunakan adalah 26 propinsi di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode tahun 1996-2003 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- Mengestimasi pengaruh dari konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode tahun 1996-2003.
- Menganalisis pengaruh dari konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode tahun 1996-2003.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Praktis**

Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat meningkatkan keterampilan meneliti terutama dalam penggunaan alat kuantitatif dan bagi peneliti lain digunakan sebagai bahan perbandingan atau gambaran pemikiran bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. **Manfaat Kebijaksanaan**

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam usaha pemulihan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

3. **Manfaat Ilmiah**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan menambah khasanah pengetahuan terutama dalam mengaplikasikan teori dan konsep ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi dan studi pembangunan.

#### **1.5 Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi landasan awal dalam kerangka berpikir dalam merumuskan suatu masalah. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis, dan model analisis. Dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian ini. Bab ini akan diakhiri dengan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan serta model analisis yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perkembangan variabel-variabel penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis, dan pembahasannya.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta mencoba mengajukan saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perumus kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menurut para ahli ekonomi memiliki beberapa definisi yang sebenarnya sama tetapi berbeda menurut sisi para ahli memandangnya dari berbagai segi, antara lain menurut Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 1999: 57). Dalam analisisnya yang panjang lebar, Prof. Kuznets mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.

6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut pemikir Neo Keynes dan Neo Klasik, definisi pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Djoyohadikusumo, 1994: 1). Sedangkan menurut Samuelson dan W. Nordhaus, pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (*Product Possibility Frontier/PPF*) bangsa bergeser ke luar.

Menurut Prof. W. A. Lewis, “pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah : upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kepala”. Akan tetapi karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan “kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah” maka Prof. Craicross dengan tepat menyatakan : “Pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum, dan ketertiban, dan sebagainya” (Jhingan, 2004: 41).

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah :

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal/SDM.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2000: 137)

Bahwasanya sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum dapat dibedakan bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal/SDM dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Disini kurva kemungkinan produksi dapat digunakan secara luas untuk menganalisis pilihan-pilihan produksi yang tersedia dalam suatu perekonomian, memahami implikasi-implikasinya terhadap tingkat output dan “biaya oportunitas” (*opportunity cost*) atas adanya sebagian sumber daya secara tidak optimal (di bawah kapasitas sesungguhnya), dan sekaligus mengamati dampak-dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya penawaran SDA dan peningkatan teknologi produksi (Todaro, 2000: 143).

### 2.1.2 Model Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dipelopori oleh Romer (1986, 1990), Lucas (1988), Barro (1990), dan Robelo (1991) menekankan pada mekanisme dimana variabel kebijakan tidak hanya berpengaruh pada tingkat output, tetapi juga tingkat pertumbuhan yang mapan (*steady state level*). Barro (1990) merupakan salah satu yang memperkenalkan suatu model yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan dan kebijakan fiskal. Barro membedakan empat kategori keuangan public, yaitu *productive expenditure* dan *non productive expenditure*, serta *distortionary taxation* dan *non distortionary taxation*. Pengeluaran pemerintah dianggap produktif jika berkontribusi langsung terhadap output. Perpajakan adalah *distortionary* jika mempengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan output.

Kerangka pemikiran model Barro menunjukkan bahwa baik *productive public expenditure* maupun *distortionary taxation* keduanya dapat mempengaruhi pertumbuhan output. Diasumsikan bahwa populasi konsumen dinormalkan ke satu (*normalised to one*), serta baik konsumsi konsumen maupun produksi output akhir keduanya mengikuti fungsi produksi:

$$y = Ak^{1-y}g^y \quad (1)$$

dimana  $k$  adalah akumulasi kapital fisik dan  $g$  adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif (*productive government expenditure*)

Diasumsikan bahwa kendala anggaran pemerintah (*government budget constraint*) adalah berimbang (*balance*) pada setiap periode dan ditentukan oleh:

$$g + G = \tau y + T \quad (2)$$

dimana  $G$  menggambarkan pengeluaran pemerintah lainnya yang tidak secara langsung menjadi input dalam fungsi produksi,  $T$  adalah pajak *lump-sum* dan  $\tau$  merupakan pajak proporsional terhadap output yang mendistorsi keputusan investasi.

Tingkat pertumbuhan konsumsi dan output dalam kondisi *steady state level* menunjukkan bahwa *productive government expenditure* sebagai hasil dari pembagian dengan output mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan, sementara *distortionary taxation* berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Baik *unproductive expenditure* maupun *lump-sum taxation* tidak berpengaruh terhadap output dalam kondisi *steady state level*. Variabel fiskal dari kedua sisi kendala anggaran berperan terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu *unproductive government expenditures* dan *distortionary taxation* dalam regresi dapat menimbulkan bias spesifikasi.

Teori pertumbuhan endogen merupakan teori yang menarik yang berusaha menutup gap dari Neoklasik model dengan menggunakan teknologi sebagai faktor eksogen atau disebut juga pemodelan perubahan teknologi secara endogen. Meskipun teori baru ini menarik, banyak penelitian empiris yang dilakukan masih menggunakan model Neoklasik. Bagaimanapun juga, model neoklasik dan model pertumbuhan endogen seharusnya tidak dipandang sebagai suatu alternatif antara satu dengan lainnya, tetapi sebagai pelengkap antara satu dengan lainnya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berkembang secara cepat diseluruh penjuru dunia dan bahwa semua Negara mempunyai akses terhadap teknologi yang sama oleh karena itu keputusan yang berbeda terhadap investasi fisik dan modal manusia akan mendorong timbulnya perbedaan dalam manfaat/keuntungan yang dapat diperoleh dari pengetahuan yang tersedia.

### **2.1.3 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar**

Teori ini dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Prof. R.F. Harrod dan Evsey Domar. Baik Harrod maupun Domar tertarik untuk mencari tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan bagi kehidupan perekonomian yang berjalan mulus dan tak tersendat-sendat. Kendati model mereka berbeada dalam rincian, namun keduanya nyaris sampai pada kesimpulan yang sama. Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut

sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua disebut “dampak penawaran” investasi (Jhingan, 2000: 229).

Domar membangun modelnya di sekitar pertanyaan berikut: karena investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produktif, maka pada laju berapakah investasi harus meningkat agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan di dalam kapasitas produktif, sehingga pekerjaan penuh dapat dipertahankan? Ia menjawab pertanyaan ini dengan mempererat kaitan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat melalui investasi (Dumairy, 2000: 230). Baik Harrod maupun Domar menekankan pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Harrod dan Domar menitikberatkan bahwa akumulasi kapital (investasi) itu mempunyai peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan disamping itu menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital (Irawan dan Suparmoko, 2002: 51).

Model Harrod didasarkan pada 3 macam laju pertumbuhan. Pertama, laju pertumbuhan aktual, dinyatakan dengan  $G$ , yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal-output. Laju ini menunjukkan variasi siklus jangka pendek dalam laju pertumbuhan. Kedua, laju pertumbuhan terjamin, yang dinyatakan dengan  $G_w$ , yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. Terakhir, laju pertumbuhan alamiah (natural growth rate), yang dinyatakan dengan  $G_n$ , yang oleh Harrod dianggap sebagai “optimum kesejahteraan”. Ia dapat juga disebut laju pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh (Dumairy, 2000: 232).

Model pertumbuhan ekonomi :

1. Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau  $s$ , dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY$$

2. Investasi ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili  $\Delta K$ , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \quad (1)$$

Akan tetapi karena jumlah stok modal  $K$  mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output  $Y$ , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal output,  $K$ , maka:

$$\frac{K}{Y} = k \quad (2)$$

atau  $\frac{\Delta K}{\Delta Y} = k$

atau akhirnya  $\Delta K = k \Delta Y \quad (3)$

3. Terakhir mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional ( $S$ ) harus sama dengan keseluruhan investasi ( $I$ ), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I$$

Dari persamaan (1) diatas telah diketahui bahwa  $S = sY$  dan dari persamaan (2) dan persamaan (3), kita juga telah mengetahui bahwasanya:

$$I = \Delta K = k \Delta Y \quad (4)$$



Dengan demikian “identitas” tabungan yang merupakan persamaan modal dalam persamaan (4) adalah sebagai berikut:

$$S = sY = k \Delta Y = \Delta K = I \quad (5)$$

atau bisa diringkas menjadi  $sY = k \Delta Y$  (6)

Selanjutnya apabila kedua sisi persamaan (6) dibagi mula-mula dengan  $Y$  dan kemudian dengan  $K$ , maka akan didapat:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (7)$$

$\frac{\Delta Y}{Y}$  sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP.

Persamaan (7) merupakan versus sederhana dari persamaan Harrod-Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional,  $S$  serta rasio modal-output nasional,  $K$ . Logika ekonomi yang terkandung di dalam persamaan (7) tersebut adalah supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan pesat, maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari GNP-nya. Semakin banyak yang diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Todaro, 2000: 95-96).

Dalam model Harrod maupun Domar terdapat pangkal dalil bahwa kondisi ekuilibrium ditandai oleh laju pertumbuhan yang proporsional dan konstan dalam perkembangan ekonomi. Model Harrod maupun Domar berpangkal pada dalil, bahwa capital output ratio adalah besaran yang konstan. Dalam gagasan Harrod hal itu dikaitkan dengan tingkat bunga yang bersifat kaku dalam jangka pendek, sedangkan Domar berpendapat bahwa teknologi tetap konstan selama masa waktu tertentu (juga dalam jangka pendek) (Djyohadikusumo, 1994: 343).

Ihtisar dari analisis Harrod-Domar :

- Investasi merupakan pusat dari persoalan pertumbuhan yang mantap, sebab proses investasi itu mempunyai 2 sifat yaitu menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi dalam perekonomian.
- Laju pertumbuhan yang seimbang itu tergantung pada besarnya angka pengganda dan tingkat produktivitas investasi yang baru.
- Laju pertumbuhan yang sebenarnya (*actual rate of growth*) dapat berbeda dengan laju pertumbuhan yang mantap (*warranted rate of growth*). Bila laju pertumbuhan yang sebenarnya ( $G_r$ ) lebih tinggi dari laju pertumbuhan yang mantap ( $G_w$ ) akan terjadi inflasi dan sebaliknya bila laju pertumbuhan yang sebenarnya ( $G_r$ ) lebih tinggi dari laju pertumbuhan yang mantap ( $G_w$ ) akan terjadi deflasi (Irawan dan Suparmoko, 2002: 66).

#### 2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ . Formula ini dikenal dengan identitas pendapatan nasional. Variabel  $Y$  melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat, sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel  $G$  melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Dengan membandingkan nilai  $G$  terhadap  $Y$  serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan

nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional (Dumairy, 1996: 157).

Sama halnya dengan penerimaan negara, maka pengeluaran negara juga terbagi dalam 2 kategori, yaitu :

1. Pengeluaran rutin,
2. Pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran rutin secara garis besar dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi dan berdasarkan sektor. Pengeluaran rutin berdasarkan klasifikasi ekonomi dialokasikan ke dalam beberapa jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, pembayaran bunga dan pokok pinjaman, subsidi, serta pengeluaran rutin lainnya. Selain itu, pengeluaran rutin juga dialokasikan lebih lanjut ke dalam 20 sektor (Kunarjo, 2002: 144).

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran pembangunan ini dapat dibagi menjadi : 1) Pengeluaran yang bersumber dari dana rupiah murni; dan 2) Pengeluaran yang bersumber dari bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan yang bersumber dari rupiah murni adalah dana pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran di dalam negeri dilakukan dari sumber dalam negeri yang berupa rupiah murni. Dilihat dari kategori penggunaannya, dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 1) Pengeluaran habis pakai (*exhaustive expenditure*); dan 2) Pengeluaran transfer (*transfer payment*) (Kunarjo, 2002: 146)

Selain klasifikasi diatas pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan kesehatan masyarakat (*public health*).
3. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek *tourisme*. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat yang sama ketika pengeluaran terjadi, penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di

masa yang akan datang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar (Irawan dan Suparmoko, 2003: 45).

Menurut Hugh Dalton dalam bukunya "**Principle of Public Finance**" kalau kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Tetapi harus kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP) adalah suatu ukuran kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian (Irawan dan Suparmoko, 2003: 21).

Peacock dan Weisman membedakan adanya 3 dampak pengeluaran pemerintah yaitu dampak penggantian (*displacement effect*), dampak inspeksi (*inspection effect*), dan dampak konsentrasi (*concentration effect*) (Irawan dan Suparmoko, 2003: 23).

W.W. Rostow dan R.A. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total, dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, relatif besar. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Sementara itu Rostow juga berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-

pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Dumairy, 1996: 163).

Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah, baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dan penggunaan faktor-faktor produksi (Irawan dan Suparmoko, 2003: 30).

Untuk menilai kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada pengaruh dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap alokasi sumber, atau kombinasi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Kriteria yang pada umumnya digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah adalah :

- Keadilan (*equity*),
- Efisiensi ekonomis (*Economic efficiency*),
- Kebapakan (*Paternalisme*), dan
- Kebebasan perorangan (Suparmoko, 2003: 31).

### 2.1.5 Investasi Pemerintah

Pada dasarnya penelitian mengenai bagaimana kebijakan fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan ukuran agregat, yaitu pengeluaran total pemerintah (*total public expenditure*). Bagaimanapun juga, tidak semua komponen pengeluaran pemerintah dapat diharapkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam cara yang sama. Investasi pemerintah dalam modal fisik dipandang lebih penting dibanding konsumsi pemerintah bagi kinerja ekonomi makro.

Terlepas dari pengaruh *multiplier* secara langsung yang dihasilkan dari semua jenis pengeluaran pemerintah, prasarana umum merupakan input penting dalam proses produksi sektor swasta yang berpengaruh terhadap output dan produktivitas. Keberadaan prasarana umum tidak hanya memperbesar stok modal (*capital stock*) suatu bangsa, tetapi juga memungkinkan penggunaan stok modal yang ada lebih menjadi lebih efisien.

Secara intuisi, perusahaan tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya perluasan system transportasi seperti jalan raya, bandara. Jaringan komunikasi, fasilitas listrik dan gas, saluran pembuangan, dan berbagai prasarana umumlainnya. Demikian juga, kualitas prasarana umum merupakan elemen yang sangat penting. Kualitas prasarana umum yang buruk dapat menurunkan produktivitas modal swasta dan tenaga kerja (Munnel (1990a)).

Prasarana umum mempunyai karakteristik *nonexcludability* dan *large economies of scale*. Adanya dua karakteristik ini membuat sector swasta tidak bersedia dan tidak mampu menghasilkannya, sehingga tugas untuk penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, kegagalan dalam memperluas prasarana umum termasuk pemeliharanya atau secara umum investasi pemerintah yang rendah dapat menurunkan aktivitas ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, Barro (1990) dan Stern (1991) secara teoritis, menyatakan bahwa teori pertumbuhan modern seharusnya tidak mengabaikan *public capital stock*.

### 2.1.6 Investasi Swasta

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai: “pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan". Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian (Sukirno, 2000: 366).

Peranan investasi dalam perekonomian, khususnya di negara yang sudah berkembang sangat erat hubungannya, kerap kali fluktuasi kegiatan ekonomi berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam kegiatan investasi. Investasi swasta adalah sangat "*volatile*", yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar, dan merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Di samping itu perlu diingat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranannya bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Sukirno, 2000: 367-368).



Suherman Rosyidi (2001: 169-173) membagi investasi menjadi empat kategori yang masing-masing terdiri dari dua jenis investasi. Yang pertama, *autonomous investment* adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor di luar pendapatan, misalnya tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, ekspektasi para pengusaha dan sebagainya dan *induced investment* adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kedua, *public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua, dan kecamatan maupun desa. *Private investment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh swasta. Yang ketiga, *domestic investment* adalah investasi atau penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. Yang keempat, *gross investment* adalah total investasi yang dilaksanakan pada suatu ketika dan *net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

### 2.1.7 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pendapat-pendapatnya dibagi atas empat kelompok besar yang masing-masing didasarkan atas asumsi dan simpulan yang berbeda, yaitu:

1. *Export Base-Models*

Dipelopori oleh North (1955) dan Tiebout (1956). Pertumbuhan ekonomi suatu *region* lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan

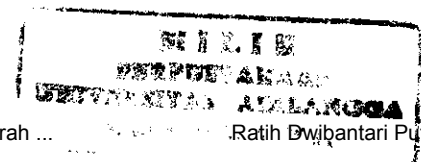
ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap *region*, tergantung pada masing-masing keadaan geografi. Strategi pembangunan harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan dapat berbeda dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.

## 2. *Neo-Classic Models*

Dipelopori oleh Borts Stein (1964), Roman (1965), dan Siebert (1969) yang mendasarkan analisisnya pada peralatan fungsi produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Kekhususan teori ini adalah pembahasan secara mendalam pengaruh perpindahan penduduk dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah adalah pada negara yang sedang berkembang, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*), sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (*convergence*). Alasan utama yang dikemukakan adalah bahwa lalu lintas orang dan modal masih belum lancar pada negara yang sedang berkembang, sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat pertumbuhan belum terjadi. Proses penyesuaian di negara-negara yang telah maju dapat terjadi dengan lancar karena telah sempurnanya fasilitas perhubungan dan komunikasi.

## 3. *Cumulative Caution Models*

Dipelopori oleh Myrdal (1957) dan Kaldor (1970). Peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada



kekuatan pasar (*Market Mechanism*), tetapi hal ini baru akan dapat dilakukan melalui campur tangan aktif dari pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah-daerah yang relatif masih terbelakang.

#### 4. *Core Periphery Models*

Dipelopori oleh Friedmann (1966) yang menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan desa (*periphery*). Gerak langkah pembangunan perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Corak pembangunan daerah pedesaan tersebut juga ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Kweka dan Morrissey (1999) yang berjudul “**Government Spending and Economic Growth Empirical Evidence from Tanzania (1965-1996)**” menunjukkan bahwa ada hubungan positif diantara ekspor, bantuan luar negeri, dan pengeluaran untuk SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah di Tanzania merupakan variabel yang tidak produktif namun diantisipasi dengan naiknya investasi swasta yang seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, meskipun hal ini tidak terjadi di Tanzania. Model analisis yang digunakan adalah ECM (*Error Correction Model*) yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan

ekonomi dalam jangka pendek dan panjang. Sampel penelitian yaitu negara Tanzania menggunakan data *time series* dengan periode penelitian 31 tahun (1965-1996).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ibrahim (2000) dengan judul **“Public and Private Capital Formation and Economic Growth in Malaysia, 1961-1995”** menunjukkan hubungan yang positif antara investasi swasta dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita. Sedangkan investasi pemerintah menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita, hal ini menunjukkan tidak produktifnya investasi pemerintah selama kurun waktu yang sedang diteliti. Analisis ini berdasarkan pada regresi pertumbuhan Neo Klasik dengan menggunakan model *Error Correction Framework* yang menyelidiki hubungan antara investasi swasta dan investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi per kapita. Sampel penelitian yaitu negara Malaysia menggunakan data *time series* dengan periode penelitian selama 35 tahun dari tahun 1965 sampai 1995.

Penelitian lain dilakukan pula oleh Rahayu (2000) dengan judul penelitiannya **“Peranan Sektor Publik Lokal dan Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan yang terjadi di Indonesia (1987-1996)”**. Berdasarkan analisis hasil estimasi dan proses perhitungan yang dilakukan, diperoleh bahwa secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa ternyata selama periode pengamatan peranan sektor publik lokal (penerimaan, investasi, tenaga kerja dan pajak daerah) dan sektor swasta mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik untuk hasil analisis estimasi dengan memasukkan hasil migas maupun non migas. Pajak lokal dan penerimaan non pajak mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara investasi dan konsumsi pemerintah daerah

mempunyai pengaruh yang positif. Model analisis yang digunakan GLS (*Generalized Least Square*) yang menyelidiki hubungan antara sektor publik lokal dan sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian menggunakan data panel dari 26 propinsi di Indonesia dengan periode penelitian 1987-1996.

## 2.3 Hipotesis dan model Analisis

### 2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan, yaitu :

Diduga konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan pada pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode 1996-2003.

### 2.3.2 Model Analisis

Analisis pada penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode 1996-2003. Model analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *independent variable* (investasi pemerintah daerah, konsumsi pemerintah daerah, dan investasi swasta daerah) terhadap *dependent variable* (pertumbuhan ekonomi daerah) yaitu model regresi linier berganda pada data panel untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan demikian model analisisnya adalah sebagai berikut :

$$G = \alpha + \beta_1 (I_g/Y_{t-1})_i + \beta_2 ((C_g/Y_t)C_g)_i + \beta_3 (I_p/Y_{t-1})_i + \theta D + \varepsilon$$

### 3.3 Definisi Operasional

Batasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia diartikan sebagai proses perubahan (peningkatan maupun penurunan) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dinyatakan dalam persentase. Data PDRB yang digunakan atas dasar harga konstan 1993 diambil dari Badan Pusat Statistik.
2. Konsumsi Pemerintah Daerah adalah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data konsumsi pemerintah daerah diambil dari Statistik Indonesia terbitan dari Badan Pusat Statistik. Konsumsi pemerintah daerah menggunakan perhitungan laju konsumsi pemerintah daerah yaitu  $Cg^* = (Cg_t - Cg_{t-1})/Cg_{t-1}$ . Dimana konsumsi pemerintah daerahnya diukur dengan  $(Cg/Y_t) Cg^*$ .
3. Investasi Pemerintah Daerah adalah pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data investasi pemerintah daerah diambil dari Statistik Indonesia di Badan Pusat Statistik. Investasi pemerintah daerah diukur dengan  $Ig/Y_{t-1}$ .
4. Investasi Swasta Daerah adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta di 26 propinsi di Indonesia. Data investasi swasta daerah diambil dari data PDRB di Badan Pusat Statistik. Investasi swasta daerah merupakan hasil dari total investasi daerah dikurangi investasi pemerintah daerah. Total investasi daerah merupakan besarnya distribusi penggunaan

Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi swasta daerah diukur dengan  $I_p/Y_{t-1}$ .

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data panel dari 26 propinsi di Indonesia tahun 1996 sampai dengan 2003. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu data PDRB dan APBD yang tercantum dalam Statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan cara memperoleh, mengumpulkan dan mengolah data melalui berbagai literatur. Data sekunder skripsi ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu data PDRB dan APBD yang tercantum dalam Statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik.

### 3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan dipakai dalam studi ini untuk mengolah data adalah teknik penaksiran GLS yang biasanya digunakan untuk menganalisis data *time series* dan *cross section*. Teknik analisis yang digunakan tidak dengan OLS biasa, sebab ada analisis yang membedakan antar unit individu dan antar waktu yang harus diperhitungkan. Hsiao (1990: 1-2) mengemukakan bahwa keuntungan regresi dengan menggunakan data panel dibandingkan dengan data *time series* atau data *cross section* saja adalah data panel biasanya memberi data yang banyak, menaikkan

derajat kebebasan (*degree of freedom*), mengurangi kolinearitas di antara variabel penjelas sehingga menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Keuntungan lainnya adalah data *longitudinal* membolehkan penelitian untuk menganalisis sejumlah pertanyaan penting yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan data *cross section* atau *time series*. Kesulitan utama dari penggunaan data panel adalah penggunaan data *cross section* menyebabkan faktor pengganggu akan berpotensi mengandung gangguan tidak konsistennya parameter regresi yang disebabkan karena skala data berbeda. Penggunaan data *time series* berpotensi mengandung bahaya autokorelasi antar pengamatan, serta gangguan yang disebabkan karena gabungan dari keduanya (Pyndick dan Rubinfeld, 1998: 46). Mengingat terdapat informasi apriori sebelumnya bahwa dalam penggunaan data panel diduga mengandung resiko timbulnya masalah adanya korelasi *time series* dalam unit observasi maupun *cross section* antar unit observasi (UGM, 2001. a: 4 dan Baltagi, 1994: 324-325), maka Kmenta (1986, dalam Baltagi, 1998: 324-326) menyarankan perlunya tindakan perbaikan persamaan regresi sebelumnya yang diduga mengandung masalah adanya korelasi *time-series* dalam unit observasi maupun *cross section* antar unit observasi tersebut di atas dengan cara regresi data panel dengan pendekatan *covariance*. Asumsi yang digunakan adalah bahwa regresi data panel memiliki ketidak konsistenan estimasi konstanta dan *slope* regresi sehingga perlu diintroduksi penggunaan variabel boneka (*dummy*) untuk mengatasi ketidakstabilan koefisien regresi tersebut. Model umum dari pendekatan *covariance* ini adalah :

$$Y_{it} = a + b X_{it} + c_2 W_{2t} + c_3 W_{3t} + \dots + c_n W_{nt} + D_2 Z_{i2} + d_3 Z_{i3} + \dots + d_t Z_{it} + e_{it}$$



Dimana :

$X_{it}$  adalah *dummy* untuk data observasi *cross section* daerah  $i$  tahun  $t$ .

$Z_{it}$  adalah *dummy* untuk data observasi *time series* periode  $t$  daerah  $i$ .

Sejumlah  $K$  regressor pada  $X_{it}$  tidak termasuk *constant term*,  $a$  adalah *individual effect* yang konstan antar waktu  $t$  dan spesifik untuk masing-masing unit *cross section*  $i$ . Model ini disebut dengan model regresi klasik dan jika kita menganggap  $a$  adalah sama untuk semua unit individu, maka OLS memberikan estimasi yang koefisien untuk parameter  $a$  dan  $b$ . Beberapa pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data ialah *common fixed effect* (menetapkan bahwa  $a$  adalah sebagai kelompok yang spesifik atau berbeda dalam *constant term* dalam model regresinya) dan *random effect* (meletakkan  $a$  adalah gangguan spesifik kelompok, sama dengan  $e_{it}$ , kecuali untuk masing-masing kelompok tetapi gambaran tunggal yang memasukkan regresi sama untuk masing-masing periode). Model yang digunakan dalam analisis estimasi di dalam skripsi ini adalah model yang menggunakan variabel *dummy* untuk observasi data panel karena periode penelitian memungkinkan untuk menggunakannya yaitu variabel *dummy* krisis ekonomi . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis panel data ialah *common fixed effect*.

### 3.6.1 Uji Statistik

setelah model data panel tersebut diatas diestimasi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian statistic terhadap hasil estimasi model data panel tersebut. Uji statistik terdiri dari uji  $R^2$ , uji signifikasi parameter secara parsial (uji  $t$ ), uji signifikasi parameter secara simultan (uji  $F$ ).

### a. Koefisien Determinasi Majemuk $R^2$

Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 dan 1. Semakin nilai  $R^2$  mendekati nilai 1 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin nilai  $R^2$  mendekati 0 maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

Rumus menghitung nilai  $R^2$  yaitu :

$$R^2 = \frac{\sum y^*{}^2}{\sum y^2}$$

Dimana  $y^*$  adalah nilai  $y$  estimasi

$y$  adalah nilai  $y$  aktual

Nilai dapat dihitung dengan :

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Dimana RSS adalah *residual sum square*

TSS adalah *total sum square*

### b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

Rumus uji t, yaitu :

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana  $t$ : nilai t

$\beta_i$ : nilai koefisien regresi

$S\beta_i$ : standar deviasi koefisien regresi

Hasil berdasarkan rumus di atas dibandingkan dengan nilai tabel t

- Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel, hal ini menandakan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh pada variabel dependen dengan tingkat signifikansi tertentu.
- Jika nilai t-statistik < nilai t-tabel, hal ini menandakan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh pada variabel dependen dengan tingkat signifikansi tertentu.

### c. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus Uji F yaitu :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (N - k - 1)}$$

Dimana  $R^2$ : koefisien determinasi

F : nilai F

K : jumlah variabel independen

N : jumlah observasi

Hasil perhitungan berdasarkan rumus dibandingkan dengan nilai tabel F

- Jika nilai F-statistik > nilai F-tabel, hal ini menandakan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi tertentu.
- Jika nilai F-statistik < nilai F-tabel, hal ini menandakan bahwa variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi tertentu.

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *p-value* pada nilai F-statistik dan t-statistik.

*P-value* adalah nilai terkecil dari  $\alpha$  dimana  $H_0$  dapat ditolak (Black, 2004: 301). Nilai  $\alpha$  yang ditentukan lebih besar dari nilai *p-value* maka  $H_0$  ditolak yang berarti ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$  yang ditentukan maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *p-value* dalam hasil analisis regresi ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-statistik dan F-statistik. Nilai  $\alpha$  ditentukan oleh penulis. Dalam menganalisis hasil regresi, penulis memakai metode *p-value*.

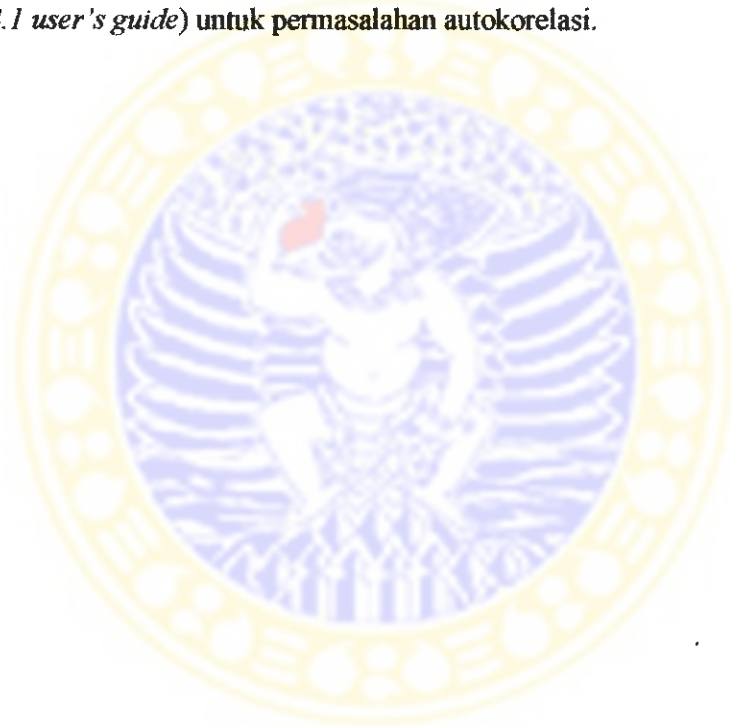
### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pada skripsi ini tidak akan dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap hasil estimasi model penelitian data panel sebagaimana umumnya dilakukan pada hasil estimasi model dengan teknik OLS terhadap data *time series* ataupun *cross section*.

Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu :

1. Literatur ekonometri yang digunakan dalam skripsi ini tidak menjelaskan mengenai metode untuk menguji asumsi klasik pada model regresi data panel (Griffiths, 2001; Maddala, 1998; Pyndick & Rubbinfield, 1991; dan Gujarati, 2003).
2. Pada fasilitas yang disediakan oleh Eviews 4.1 untuk mengolah data panel tidak tersedia menu untuk menguji asumsi klasik (*residual test*).

3. Meskipun tidak menyediakan menu untuk menguji asumsi-asumsi klasik (*residual test*) pada data panel. Eviews 4.1 menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi masalah pelanggaran asumsi klasik tersebut seperti heterokedastisitas dan autokorelasi. Eviews 4.1 menyediakan fasilitas *cross section weighting* untuk heterokedastisitas. Eviews 4.1 menyediakan fasilitas interasi otomatis dalam spesifikasi AR (*Auto Regresif*) hingga bobot dan koefisien parameternya konvergen (*Eviews 4.1 user's guide*) untuk permasalahan autokorelasi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia

Sebelum adanya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, variabel ekonomi makro berada pada kondisi yang positif bagi pertumbuhan perekonomian di 26 propinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada tahun 1996 tampak pada Tabel 4.1 pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia menunjukkan angka yang positif, pertumbuhan ekonomi yang positif seiring dengan keadaan ekonomi yang cenderung baik pada saat itu, namun hal itu tidak berlangsung lama ketika resesi ekonomi pertengahan tahun 1997 mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mengalami penurunan menginjak tahun 1997 dengan penurunan terbesar nampak di propinsi Riau sebesar minus 57%. Hal ini terjadi di seluruh propinsi. Pada saat krisis ekonomi mencapai puncaknya pada tahun 1998 hampir seluruh propinsi mengalami penurunan laju pertumbuhan, kecuali propinsi Papua yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan justru di saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pada tahun 1997 laju pertumbuhannya mencapai 8% dan naik pada tahun 1998 menjadi sebesar 13,9%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang paling tinggi tampak terjadi di propinsi Jawa Barat yang pada tahun 1998 sebesar minus 18%.

**Tabel 4.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**Periode 1996 – 2003 (Persen)**

Daerah	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
N ACEH DARUSSALAM	2.5	-0.2	-9.3	-4	-8.2	1.2	0.4	3.4	-1.80
SUMATERA UTARA	9	5.7	-11	2.6	4.8	3.7	4.1	4.4	2.93
SUMATERA BARAT	7.9	5.1	-6.8	1.6	3.8	3.6	4.3	4.5	3.01
RIAU	5.5	-57	-1.8	4.2	147	4.3	4.4	4.7	13.94
JAMBI	8.8	3.9	-5.4	2.9	5.4	5.9	4.4	4.5	3.80
SUMATERA SELATAN	8	5.1	-6.8	3.2	-12	2.4	3.8	4.5	1.02
BENGKULU	6	2.8	-6.3	2.8	4	4	4.3	5.1	2.85
LAMPUNG	8	4.2	-6.9	2.6	4.4	3.6	5.2	5.7	3.32
DKI JAKARTA	9.1	5.1	-17	-0	4.3	3.6	4	4.4	1.60
JAWA BARAT	9.2	4.9	-18	2.3	-7.5	4.8	3.9	4.3	0.50
JAWA TENGAH	7.3	3	-12	3.5	3.9	3.3	3.5	4.2	2.12
DI YOGYAKARTA	7.8	3.5	-11	0.9	5.8	3.4	4	4.1	2.29
JAWA TIMUR	8.3	5	-16	1.8	2.6	3.3	3.4	4.1	1.56
BALI	8.2	5.8	-4	0.7	3	3.4	3.1	3.6	2.98
NUSA TENGGARA BARAT	8.1	5.3	-3.1	3.1	30	9	3.8	3.1	7.44
NUSA TENGGARA TIMUR	8.6	5.6	-2.7	2.7	4.2	5.1	6	5.9	4.42
KALIMANTAN BARAT	11	7.5	-4.7	2.7	2.9	1.9	2	2.9	3.26
KALIMANTAN TENGAH	12	6.3	-6.9	1.3	1.2	2.7	3.3	4.9	3.07
KALIMANTAN SELATAN	10	4.7	-5.5	2.6	6.3	3.7	3.8	4.9	3.80
KALIMANTAN TIMUR	8.3	-42	-2.8	4.1	94	5	4.7	2.4	9.16
SULAWESI UTARA	9.3	5.4	-2.4	5.8	-17	-4.3	4	5.2	1.78
SULAWESI TENGAH	8.3	4.7	-4	2.8	4.2	5.2	5.4	6.3	4.12
SULAWESI SELATAN	8.3	4.3	-5.3	2.8	4.9	5	4.6	5.4	3.75
SULAWESI TENGGARA	6	5.3	-5.8	2.5	5.3	5.6	6.5	7.2	4.08
MALUKU	7.1	3.5	-5.9	-24	-41	-1.6	3	3.5	-6.95
PAPUA	13	8	13.9	-4	2.2	-1.6	8.7	3	5.36

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB (diolah)

Namun setelah tahun 1999 keadaan perekonomian berangsur membaik begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan peningkatannya setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, kecuali untuk propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Papua. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai tahun 1998 sampai 2000 mengalami penurunan terus-menerus, baru meningkat perlahan mulai tahun 2001 sampai 2003. Demikian halnya dengan propinsi Maluku dan Papua pada tahun 1999 masih menunjukkan penurunan

kemudian di tahun 2000 meningkat turun kembali pada tahun 2001 dan kembali naik pada tahun 2002 sampai 2003 stabilitas perekonomian mulai diperkokoh kembali.

Dilihat dari sisi permintaan, penurunan PDRB pada tahun 1997 dan 1998 tersebut dikarenakan oleh melemahnya permintaan domestik khususnya penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Hal ini sebagai akibat krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang melanda Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh fundamental ekonomi yang lemah, tetapi karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar (Tarmidi, 1999: 3).

Propinsi Riau merupakan propinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi dikarenakan pada tahun 2000 mencapai laju pertumbuhan sebesar 147%, dikarenakan PDRB Riau tahun 2000 meningkat hampir dua kali dari PDRB tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah per tahun sebesar 13,94%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun yang terkecil adalah propinsi Maluku yang pernah mencapai laju pertumbuhan sampai minus 41% pada tahun 2000 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerahnya per tahun sebesar minus 6,95%.

#### **4.1.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah**

Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran rutin daerah (konsumsi pemerintah daerah) dan pengeluaran pembangunan daerah (investasi pemerintah daerah). Konsumsi pemerintah daerah dibelanjakan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintah daerah dan pemeliharaan hasil pembangunan di daerah itu sendiri, sedangkan investasi pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang dibelanjakan untuk keperluan investasi daerah.



Pemerintah melakukan pengeluaran yang berfungsi sebagai alat stabilisasi perekonomian dan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan guna mendorong jalannya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4.2**  
**Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Daerah di Indonesia**  
**Tahun 1996 – 2003 (Persen)**

Daerah	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
N.ACEH DARUSSALAM	7.51	9.73	-26	-30	-1.8	128	52.3	32.7	21.53
SUMATERA UTARA	7.24	13.9	-39	-51	28.3	129	46.3	-18	14.70
SUMATERA BARAT	13.7	15.1	-0.7	11.4	13.7	85.3	50.3	2.41	23.89
RIAU	22.9	21.8	11.1	33.3	34.1	40	46.9	16	28.27
JAMBI	25.6	19	1.68	19.8	19.5	102	61.9	26.9	34.56
SUMATERA SELATAN	13	3.72	24	-3.3	-20	132	55.3	24.3	28.69
BENGKULU	24.9	14.6	15.2	13.5	0.78	97.9	35.2	21.4	27.93
LAMPUNG	21.1	10.9	-7.5	12	19.4	72.3	57.7	21.9	25.97
DKI JAKARTA	20	8.8	-10	34.9	15	59	42	5.06	21.84
JAWA BARAT	8.7	0.26	-43	-25	51.5	73.8	23.8	20.1	13.73
JAWA TENGAH	12.4	2.02	-44	-37	31	67.4	39.8	24.8	12.02
DI YOGYAKARTA	0.1	-4.2	-31	-17	22.1	101	46.2	25.7	17.73
JAWA TIMUR	9.22	14.7	-43	-59	25.8	51.7	55.3	30.1	10.63
BALI	21.4	18.8	-5.6	50.1	19.8	101	58.1	-8.9	31.86
NUSA TENGGARA BARAT	17.5	16	5.75	15.9	57.3	108	26.5	8.36	31.91
NUSA TENGGARA TIMUR	26	19.9	-1.8	11.2	8.74	97.6	49.8	64.2	34.47
KALIMANTAN BARAT	47.6	14.2	8.21	27.9	20.7	86.2	51.9	14.5	33.90
KALIMANTAN TENGAH	15.2	6.85	-27	-16	11.9	50	32.5	30.8	13.05
KALIMANTAN SELATAN	-12	-6.4	-14	39.2	23.8	52.7	20.1	7.59	13.90
KALIMANTAN TIMUR	9.5	15.2	28.8	55.2	9.04	90.3	1.16	53	32.78
SULAWESI UTARA	11.7	13.5	13.3	23.8	-3	114	53.6	18.6	30.72
SULAWESI TENGAH	12.8	-0.2	-41	-31	34.6	91.4	52.1	31.2	18.74
SULAWESI SELATAN	23.4	21.5	3.45	21.8	7.14	67.9	29.7	16.9	23.96
SULAWESI TENGGARA	10.6	22	11	27.1	20.1	79.3	49.1	29.6	31.11
MALUKU	14.4	23.2	4.64	12.4	1.11	86.1	44.9	40.2	28.37
PAPUA	39.8	11	27.1	24.6	-8.6	83.2	85.1	23.1	35.66

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (diolah)

Komponen pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia yaitu konsumsi pemerintah daerah disajikan pada Tabel 4.2 menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahun 1996 menuju tahun 1997 tampak realisasi yang berbeda-beda pada tiap propinsi sebagian besar propinsi di

Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah, namun ada juga yang mengalami kenaikan seperti propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Pada saat terjadi puncak krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 berpengaruh pula pada penurunan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tiap daerah, hal ini dialami oleh sebagian besar propinsi di Indonesia, kecuali propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada saat itu.

Pada tahun 2001 rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah paling besar diantara tahun lainnya selama periode penelitian, hampir seluruh propinsi mengalami laju pertumbuhan yang tinggi bahkan ada beberapa propinsi yang laju PDRB-nya naik lebih dari 100% dari tahun sebelumnya dan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah pada tahun 2001 menunjukkan angka yang positif pada seluruh propinsi. Rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah per tahun yang terbesar dialami oleh propinsi Papua dengan rata-rata laju pertumbuhan konsumsi pemerintah per tahun sebesar 35,66%, sedangkan rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah per tahun yang terkecil adalah propinsi Jawa Timur dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah per tahun sebesar 10,63%.

Investasi pemerintah daerah juga merupakan salah satu komponen dari pengeluaran pemerintah daerah disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan laju pertumbuhan investasi pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahun 1996 menuju tahun 1997 tampak realisasi yang berbeda-beda pada tiap propinsi, sebagian besar propinsi di Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan investasi pemerintah

daerah, namun ada juga yang mengalami kenaikan seperti propinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Pada saat terjadi puncak krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 berpengaruh pula pada penurunan laju pertumbuhan investasi pemerintah pada tiap daerah, hal ini dialami oleh 26 propinsi di Indonesia tanpa terkecuali yang mengalami penurunan laju pertumbuhan investasi pemerintah daerah pada saat itu.

**Tabel 4.3**  
**Pertumbuhan Investasi Pemerintah Daerah di Indonesia**  
**Tahun 1996 – 2003 (Persen)**

Daerah	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
N.ACEH DARUSSALAM	28.8	12.9	-15	60.5	36.3	25.5	287	44.8	60.13
SUMATERA UTARA	36.7	20.4	-15	26.6	8.94	12.5	25.4	69.3	23.16
SUMATERA BARAT	28	15.1	-11	18	37.4	15.8	2.62	47.1	19.19
RIAU	24.9	5.05	0.69	34.2	27.7	117	79.7	26.9	39.55
JAMBI	19.8	4.09	-6.1	17.5	11.5	-28	47.4	24.7	11.40
SUMATERA SELATAN	31	11.5	-11	22.2	21.8	25	31.2	37.9	21.15
BENGGKULU	21.1	13.4	-8.2	17.3	20.7	-32	-12	78.7	12.38
LAMPUNG	20.6	2.88	-0.7	26.9	20.4	5.93	50.9	40	20.87
DKI JAKARTA	26.5	3.7	-55	3.43	74	85.3	66.2	62.3	33.27
JAWA BARAT	28.8	1.42	-30	-24	43	64.9	39	31.5	19.31
JAWA TENGAH	39.7	9.42	-21	13.2	34.9	16.8	98.2	45.6	29.59
DI YOGYAKARTA	14.7	11	-7.9	6.6	48.1	-8.7	4.52	0.13	8.56
JAWA TIMUR	43.9	12.9	-21	9.71	20.6	104	80.5	11.9	32.79
BALI	28.7	14.7	-11	-0.9	34.4	55.7	47.3	14.1	22.88
NUSA TENGGARA BARAT	15.1	19.2	5.3	31	28.4	-12	13.2	19.1	14.91
NUSA TENGGARA TIMUR	2.4	6.11	-3.6	39.3	5.92	-37	48.5	4.4	8.21
KALIMANTAN BARAT	3.34	10.7	-4.3	30.4	26.1	-12	4.8	36.2	11.88
KALIMANTAN TENGAH	9.51	7.95	-9.2	27.6	19.9	13.6	-10	27.4	10.84
KALIMANTAN SELATAN	8.03	26.5	24.2	25.7	0.45	4.97	54.1	20.1	20.51
KALIMANTAN TIMUR	15.3	9.9	-10	33.3	34.9	112	81.7	57.5	41.79
SULAWESI UTARA	17.2	7.91	-3.9	17.3	19.1	-48	84.8	11.3	13.17
SULAWESI TENGAH	10.3	15.1	-0.5	23.7	14.1	-34	-34	52.4	5.89
SULAWESI SELATAN	7.94	24.2	4.58	2.01	19.8	16.6	64.5	15.9	19.44
SULAWESI TENGGARA	19.6	6.06	1.94	20.6	24.8	-34	2.25	72.3	14.21
MALUKU	0.97	5.93	-5.4	9.59	16.2	-13	3.02	105	15.26
PAPUA	19.9	11.2	-0.3	35.5	34.9	-15	365	58.7	63.73

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (diolah)

Rata-rata pertumbuhan investasi pemerintah daerah per tahun yang terbesar dialami oleh propinsi Papua dengan rata-rata laju pertumbuhan investasi pemerintah daerah per tahun sebesar 63,73%, sama halnya dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah tertinggi yang juga dialami oleh propinsi Papua. Rata-rata pertumbuhan investasi pemerintah per tahun yang terkecil adalah propinsi Kalimantan Tengah dengan rata-rata pertumbuhan investasi pemerintah daerah per tahun sebesar 10,84%.

#### **4.1.3 Pertumbuhan Investasi Swasta Daerah**

Selain pengeluaran pemerintah hal yang dibahas dalam skripsi ini juga mengenai pengaruh investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi swasta daerah adalah investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang diperlukan untuk menutup dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pertumbuhan investasi swasta daerah seperti tampak pada Tabel 4.4 dibawah ini pada tahun 1996 menunjukkan angka yang positif hampir diseluruh propinsi, kecuali propinsi Kalimantan Timur dengan laju pertumbuhan investasi swasta daerah sebesar 0,2%. Pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh propinsi mengalami penurunan, kecuali propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan investasi swasta.

Pada tahun 1998 di saat krisis ekonomi mencapai puncaknya terutama di Indonesia, hal ini berdampak pula pada penurunan laju pertumbuhan investasi swasta hampir seluruh propinsi di Indonesia, kecuali satu propinsi yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan investasi swasta yang cukup tinggi yaitu propinsi Nusa Tenggara

Barat yang mencapai 75% pertumbuhan investasi swasta daerahnya, di saat propinsi yang lain mengalami penurunan laju pertumbuhan investasi swasta daerah.

Setelah tahun 1998, yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 laju pertumbuhan investasi mulai membaik, kecenderungan untuk pertumbuhan investasi swasta kearah positif semakin nampak meskipun kenaikannya tidak terlampau tinggi, kecuali untuk propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai tahun 1998 hingga 2003 kecenderungannya untuk senantiasa menurun.

**Tabel 4.4**  
**Pertumbuhan Investasi Swasta Daerah di Indonesia**  
**Tahun 1996 – 2003 (Persen)**

Daerah	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
N.ACEH DARUSSALAM	16	-1.4	-9.5	-13	-12	-17	-61	-90	-23.48
SUMATERA UTARA	7.9	-8	-29	14	4.5	12	-0	-1.5	-0.15
SUMATERA BARAT	9.9	7.6	-13	-17	-0.6	-0	1.2	-0.5	-1.52
RIAU	11	-48	-1.6	1.6	120	1	-6.6	-0.7	9.65
JAMBI	7.4	1.3	-35	-39	34	24	-2.8	-0.3	-1.34
SUMATERA SELATAN	9.1	5.2	-29	2.9	-32	1.5	2.7	-0.2	-4.99
BENGGULU	21	-47	-40	-15	-3.2	20	7.9	-14	-8.75
LAMPUNG	18	5	-40	-6.3	8.7	5.2	-2.7	6.7	-0.67
DKI JAKARTA	11	3.2	-36	-2.2	0.6	-1.8	-3.2	-7	-4.46
JAWA BARAT	32	-19	-18	-4.4	-30	-15	17	10	-3.43
JAWA TENGAH	8.2	-7.7	-16	-21	5	5	-2	0.5	-3.55
DI YOGYAKARTA	7.7	0.7	-22	4.6	14	4.2	7.7	8.6	3.20
JAWA TIMUR	11	5.3	-35	-8.7	4.7	-3.7	-6.1	-1.1	-4.31
BALI	8.6	-4.4	-28	0.6	-0.9	-4.5	-5.8	-2.1	-4.49
NUSA TENGGARA BARAT	9.7	4.1	75	-44	-6.8	8.4	1.2	2.4	6.28
NUSA TENGGARA TIMUR	16	-13	-19	-6	8	16	-0.7	6.8	1.07
KALIMANTAN BARAT	16	11	-9.4	-3	3	-4.6	-5.9	3.8	1.42
KALIMANTAN TENGAH	7.6	4.1	-7.8	6.9	-4.9	-7.2	2.5	3.4	0.57
KALIMANTAN SELATAN	11	34	-45	-13	19	1.4	-17	-8	-2.09
KALIMANTAN TIMUR	-0.2	-41	3.9	2	45	15	-4.8	-0	2.36
SULAWESI UTARA	12	-40	-33	-29	116	11	4.4	-20	2.59
SULAWESI TENGAH	5	-9	-20	-12	1.5	15	11	0.4	-1.05
SULAWESI SELATAN	12	20	-7	1.2	-7.9	1.2	-0.3	4.1	2.84
SULAWESI TENGGARA	7.4	0.5	-19	-2.1	2.1	12	8.7	-1.3	1.02
MALUKU	11	-3.1	-23	-105	117	-22	-12	189	19.17
PAPUA	17	11	-7.8	-11	13	14	-13	-16	0.78

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Indonesia (Diolah)

Rata-rata laju pertumbuhan investasi swasta daerah terendah juga dialami oleh propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta daerah per tahunnya mencapai minus 23,48%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan investasi swasta daerah tertinggi oleh propinsi Maluku dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta daerah sebesar 19,17% per tahun.

#### 4.2 Hasil Perhitungan Regresi

Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program Eviews 4.1. pada lampiran 1 memberikan informasi sebagai berikut:

**TABEL 4.5**  
**Hasil Perhitungan Model Regresi**

<b>Variabel tergantung: Pertumbuhan ekonomi (G)</b>				
<b>Variabel bebas</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Standar error</b>	<b>t<sub>hitung</sub></b>	<b>Signifikan</b>
Konstanta	0,029766	0,013673	2,177002	0,0306
Investasi Swasta (Ip)	0,077286	0,041190	1,876308	0,0620
Investasi Pemerintah (Ig)	0,612499	0,182344	3,3595023	0,0009
Konsumsi Pemerintah (Cg)	1,218523	0,164957	7,386921	0,0000
D (variabel <i>dummy</i> )	-0,056322	0,007027	-8,015587	0,0000
<b>R<sup>2</sup> = 0,490192</b> <b>Adjusted R<sup>2</sup> = 0,480146</b> <b>DW = 1,851601</b> <b>F<sub>hitung</sub> = 48,79720</b> <b>Sig. F<sub>hitung</sub> = 0,000000</b>				

Sumber: Hasil estimasi regresi dengan Eviews 4.1 pada lampiran 1

Berdasarkan informasi diatas, persamaan garis regresi yang ditaksir adalah sebagai berikut:

$$G = 0,029766 + 0,612499 Ig + 1,218523 Cg + 0,077286 Ip - 0,056322 D$$

Hasil estimasi regresi pada Tabel 4.5 persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel investasi pemerintah daerah menunjukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,612499. Konsumsi pemerintah daerah menunjukkan hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,218523. Variabel investasi swasta daerah menunjukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,077286. Variabel *dummy* krisis ekonomi menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,056322.

a. Koefisien Determinasi Majemuk  $R^2$

$R^2$  digunakan untuk mengukur kesesuaian dari persamaan regresi, yaitu memberikan persentase variasi total dalam *dependent variable* Y yang dijelaskan oleh *independent variable* X (tunggal). Untuk mengetahui proporsi variasi dalam Y yang dijelaskan oleh variabel-variabel X secara bersama-sama (gabungan dalam model tiga variabel atau lebih).

Kelemahan Penggunaan koefisien determinasi majemuk adalah bisa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu *independent variable* maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap *dependent variable*. Banyak peneliti menganjurkan agar menggunakan *adjusted*  $R^2$  karena nilainya dapat naik atau turun bila ada penambahan suatu *independent variable* dalam model. Analisis model dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi majemuk,  $R^2$  sebesar 0,490192 yang berarti model ini hanya menerangkan sebesar 49,01%. Nilai *adjusted*  $R^2$  dari hasil perhitungan sebesar 0,480146, hal ini berarti hanya 48,01% variasi

pertumbuhan ekonomi yang dapat diterangkan oleh variasi laju investasi pemerintah daerah, konsumsi pemerintah daerah, investasi swasta daerah, dan variabel dummy krisis ekonomi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model.

#### b. Uji t dan Uji F

Nilai  $t_{hitung}$  masing-masing variabel bebas yang didapat dari hasil olahan program Eviews 4.1 dibandingkan dengan nilai  $t_{Tabel}$  yang didapat dari uji t dua sisi (*two tail test*) dengan interval keyakinan 90%, tingkat kesalahan 10% dan derajat kebebasan ( $df = 208 - 5 - 1 = 202$ ). Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{Tabel}$ , maka variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai  $t_{hitung}$  kurang dari nilai  $t_{Tabel}$  maka variabel bebas tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,359023 untuk variabel investasi pemerintah daerah, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,386921 untuk variabel konsumsi pemerintah daerah, dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,876308 untuk variabel investasi swasta daerah, melalui uji t dua sisi dengan tingkat kepercayaan 90%, tingkat kesalahan 10%, diketahui bahwa parameter investasi dan konsumsi pemerintah maupun investasi swasta ketiga-tiganya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena nilai  $t_{hitung}$  nya lebih dari nilai  $t_{Tabel}$  yang besarnya 1,645 dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{Tabel}$  maka secara statistik  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil olahan program Eviews 4.1 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.



Pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dapat diketahui melalui uji F apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{Tabel}$  maka variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $F_{Tabel}$  maka variabel-variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh dari hasil olahan program *Eviews 4.1*. Nilai  $F_{Tabel}$  diperoleh dengan tingkat kepercayaan 90%, tingkat kesalahan 10%, dan derajat kebebasan pembilang  $N_1$  dan derajat kebebasan penyebut  $N_2$  ( $df_1 = 5$ ,  $df_2 = 202$ ).

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 48,79720 dan nilai  $F_{Tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 90%, tingkat kesalahan 10%, dan derajat kebebasan pembilang  $N_1$  dan derajat kebebasan penyebut  $N_2$  ( $df_1 = 5$ ,  $df_2 = 202$ ) adalah sebesar 1,85 ( $F_{0,10; 5 : 202} = 1,85$ ). Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, oleh karena nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{Tabel}$ .

Pada skripsi ini tidak dilakukan uji asumsi klasik terhadap hasil estimasi model penelitian dengan teknik GLS. *Eviews 4.1* menyediakan fasilitas interaksi otomatis dalam spesifikasi AR (*Auto Regressive*) hingga bobot dan koefisien parameternya konvergen sehingga mampu mengakomodasi masalah autokorelasi. Uji multikolinearitas pada program perhitungan *Eviews 4.1* dilakukan secara otomatis pada saat memilih *Cross Section Weights*, ataupun bisa dilihat dari asumsi yang menyebutkan apabila  $R^2$  tidak terlampaui tinggi dan seluruh variabel signifikan baik secara parsial maupun simultan dapat dipastikan bahwa model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

#### 4.3 Pembuktian Hipotesis

Sesuai dengan hasil analisis perhitungan regresi yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia periode 1996-2003 terbukti. Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 48,79720 dan tingkat signifikan 0,000000.

Hipotesis yang menduga konsumsi pemerintah daerah dan investasi pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial di Indonesia pada periode 1996-2003 terbukti. Hubungan positif dari konsumsi pemerintah daerah ini ditunjukkan oleh hasil regresi dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,38691 dan tingkat signifikan 0,0000, sedangkan hubungan positif dari investasi pemerintah daerah ditunjukkan oleh hasil regresi dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,359023 dan tingkat signifikan 0,0009.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia selama periode 1996-2003 dengan tingkat signifikan 0,000000. Variabel konsumsi pemerintah daerah terhadap PDRB dimaksudkan untuk mengukur pengeluaran pemerintah daerah yang yang tidak berpengaruh langsung pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah. Variabel konsumsi pemerintah daerah ( $Cg/Y$  atau  $(Cg/Y)Cg^*$ ) mempunyai koefisien positif dan signifikan sebesar 1,218523. Meningkatnya konsumsi pemerintah daerah sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebesar 1,219% dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2000) menunjukkan variabel konsumsi pemerintah daerah memberikan peranan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Pada Tabel 4.6 di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembagian propinsi berdasarkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah guna melihat pengaruh dari pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembagian tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi pemerintah daerah dapat dilihat rata-rata pertumbuhannya dari 26 propinsi yang ada di Indonesia.

Pengaruh pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terlihat jelas, konsentrasi propinsi yang terpusat pada pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah yang tinggi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula yaitu pada propinsi Riau, Jambi, Lampung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan

Papua menunjukkan, bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah yang tinggi pada propinsi-propinsi tersebut memberikan pengaruh kepada tingginya pertumbuhan ekonomi daerah pada propinsi-propinsi tersebut.

**TABEL 4.6**  
**Pembagian Propinsi Berdasarkan**  
**Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Konsumsi Pemerintah Daerah**  
**di Indonesia**

		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	
		Tinggi*	Rendah**
Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Daerah	Tinggi*	Riau Jambi Lampung NTB NTT Kalbar Kaltim Sultra Papua	Sumsel Bengkulu Bali Sulut Maluku
	Rendah**	Kalsel Sulteng Sulsel	Aceh Sumut Sumbar Jakarta Jabar Jateng DI Yogya Jatim Kalteng

Keterangan: \* = > rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia

\*\* = < rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia

Selain terkonsentrasi pada pertumbuhan yang tinggi, pengaruh pertumbuhan konsumsi yang rendah dibarengi dengan konsumsi pemerintah yang rendah juga nampak jelas pada propinsi-propinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogya, Jawa Timur, Kalimantan Tengah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah yang rendah pada propinsi-propinsi tersebut memberikan pengaruh kepada rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah pada propinsi-propinsi tersebut.

Pengaruh positif pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlihat pada propinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan konsumsi pemerintah yang rendah, namun dilain pihak pertumbuhan ekonomi daerahnya termasuk tinggi. Pengaruh yang menyimpang dari hasil penelitian juga terlihat dari propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Sulawesi Utara, Maluku yang memiliki tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi, namun tingkat pertumbuhan ekonominya termasuk rendah.

Secara umum nampak bahwa sebagian besar propinsi-propinsi terkonsentrasi pada jalur yang tepat yaitu pada tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula, sebaliknya juga terlihat pada pertumbuhan konsumsi pemerintah yang rendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah pula. Hal ini menunjukkan pengaruh dari pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terbukti adanya.

Konsumsi pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari secara terus menerus, sehingga mempunyai fungsi yang penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan daerah, terutama dalam berbagai kegiatan pembangunan, penyediaan dan peningkatan fasilitas kerja, kapasitas serta motivasi kerja bagi segenap aparatur pemerintah. Pelaksana-pelaksana pembangunan tersebut adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dan hasilnya sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembangunan. Konsumsi pemerintah atau pengeluaran rutin bersifat dapat berperan lebih nyata terhadap pertumbuhan perekonomian (Suparmoko, 2003: 79).

Investasi pemerintah daerah terhadap PDRB dimaksudkan untuk mengukur pengaruh langsung pengeluaran pemerintah daerah terhadap peningkatan

produktivitas perekonomian. Variabel investasi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia selama periode 1996-2003. angka positif pada koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara investasi pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia searah. Hal ini berarti apabila investasi pemerintah daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Hal ini dimungkinkan karena investasi pemerintah daerah diarahkan pemanfaatannya bagi proyek-proyek yang produktif, dalam arti menghasilkan nilai produksi yang lebih besar daripada nilai investasinya. Dampak positif tersebut mengisyaratkan bahwa telah terjadi efisiensi dalam pengelolaan sektor publik dan proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah mempunyai peranan yang besar dan strategis. Pentingnya pengelolaan sektor publik terutama dalam penyediaan infrastruktur tidak lain karena kegagalan suatu negara untuk menarik modal seringkali bukan disebabkan karena terbatasnya pasar atau kekurangan bahan mentah ataupun tenaga kerja tetapi lebih dikarenakan karena kekurangan berbagai jenis prasarana yang memadai di negara tersebut. Ketiadaan prasarana mempertinggi resiko atau kemungkinan kegagalan usaha tersebut, oleh karena itu tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat utama keberhasilan usaha peningkatan pembangunan.

Variabel investasi pemerintah mempunyai koefisien positif dan signifikan sebesar 0,612499. Meningkatnya investasi pemerintah daerah sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebesar 0,612% dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Hasil dari penelitian sebelumnya yang mendukung skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan

oleh Rahayu (2000), yaitu peranan sektor publik lokal dalam hal ini investasi pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan memasukkan sektor migas.

Pada Tabel 4.7 di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembagian propinsi berdasarkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan investasi pemerintah daerah guna melihat pengaruh dari pertumbuhan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembagian tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah daerah dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan dari 26 propinsi yang ada di Indonesia.

**Tabel 4.7**  
**Pembagian Propinsi Berdasarkan**  
**Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah**  
**di Indonesia**

		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	
		Tinggi*	Rendah**
Pertumbuhan Investasi Pemerintah Daerah	Tinggi*	Riau Kaltim Papua	Aceh Sumut Jakarta Jateng Jatim Bali
	Rendah**	Jambi Lampung NTB NTT Kalbar Kalsel Sulteng Sulsel Sultra	Sumbar Sumsel Bengkulu DI Yogya Jabar Kalteng Sulut Maluku

Keterangan: \* => rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia

\*\* =< rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia

Pertumbuhan investasi pemerintah daerah yang rendah pada propinsi-propinsi di Indonesia dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah pula seperti pada propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DI Yogya, Jawa

Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Hal ini menunjukkan pengaruh dari pertumbuhan investasi pemerintah yang rendah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Di lain pihak hal ini tidak terlampau tampak pada pertumbuhan investasi pemerintah yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula, dapat dilihat bahwasanya hanya ada tiga propinsi yaitu Riau, Kalimantan Timur, dan Papua yang menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi pemerintah daerah yang tinggi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula.

Propinsi-propinsi di Indonesia kebanyakan berada pada tingkat pertumbuhan investasi swasta yang rendah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti tampak pada propinsi Jambi, Lampung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Di lain pihak pertumbuhan investasi pemerintah yang tinggi dibarengi oleh pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah hanya nampak pada beberapa propinsi saja, seperti propinsi Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Secara umum dapat dikatakan pertumbuhan investasi pemerintah berdasarkan pembagian propinsi-propinsi menurut tingkat pertumbuhan meskipun secara perhitungan regresi hal ini nampak jelas pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi daerah namun pada kenyataannya pertumbuhan investasi pemerintah yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, karena hanya ada tiga propinsi yang mengalaminya. Lain halnya dengan pertumbuhan investasi pemerintah yang rendah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah pula, hal ini merupakan salah satu hasil yang sesuai dengan teori pertumbuhan yang dapat



menunjukkan pengaruh dari pertumbuhan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Investasi pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang ciri spesifiknya adalah *investment categories*, dimana penggunaan pembiayaan ini untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran-pengeluaran tersebut akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian selanjutnya (Achir, 1975: 50). Investasi pemerintah ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dalam satu periode tertentu dan merupakan investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional melalui pembangunan berbagai proyek sehingga produk domestik bruto meningkat sesuai dengan yang direncanakan (Departemen Keuangan RI, 1996: 25).

Pada dasarnya anggaran belanja pemerintah dewasa ini mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, prioritas alokasi anggaran investasi pemerintah daerah diberikan kepada proyek-proyek produktif yang berdampak luas bagi masyarakat, karena pelaksanaannya sendiri merupakan program yang memerlukan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka alokasi anggaran investasi pemerintah daerah lebih memprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar, baik yang langsung maupun tidak langsung berguna untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan prasarana perhubungan, pengairan, kelistrikan telekomunikasi, pendidikan perumahan dan kesehatan.

Anggaran investasi pemerintah daerah mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pembangunan dan merupakan alat untuk mengukur potensi dan

kemampuan dan potensi suatu daerah serta sebagai alat alokasi dana atau pembiayaan untuk berbagai program dan kemudian diterapkan dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai, maka pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator membutuhkan anggaran belanja pemerintah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Alokasi anggaran belanja pada sektor pembangunan adalah suatu kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

Menurut Halim (2001: 221) Pengeluaran investasi pemerintah terdiri dari:

1. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Belanja Aparatur. Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dinikmati oleh aparatur.

Penyusunan belanja untuk investasi pemerintah daerah terhadap proyek-proyek yang akan dibangun selalu berdasarkan atas kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah. Investasi pemerintah daerah adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya

Seperti halnya investasi pemerintah daerah, investasi swasta daerah terhadap PDRB dimaksudkan untuk mengukur pengaruh investasi swasta daerah terhadap produktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin besar investasi swasta daerah diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin besar. Investasi swasta daerah ( $I_p/Y$  atau  $I_p/Y_{t-1}$ ) di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan koefisien positif dan signifikan sebesar 0,077286. Meningkatnya investasi swasta daerah sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebesar 0,077% dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Hasil dari skripsi ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibrahim (2000) yang meneliti pengaruh antara investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia selama 35 tahun, dan didapatkan bahwa investasi swasta pengaruhnya positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Penelitian oleh Kweka dan Morrissey (1999) juga menunjukkan hal yang sama bahwasanya investasi swasta terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek. Investasi swasta daerah memberikan kontribusi yang positif kepada pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, karena mampu bekerja secara efisien dan diarahkan pada sasaran yang tepat sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian.

Pada Tabel 4.8 di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembagian propinsi berdasarkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan investasi swasta daerah guna melihat pengaruh dari pertumbuhan investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembagian tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi swasta daerah dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan dari 26 propinsi yang ada di Indonesia.

Pengaruh pertumbuhan investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terlihat jelas, konsentrasi propinsi yang terpusat pada pertumbuhan investasi swasta daerah yang tinggi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula yaitu pada propinsi Riau, NTB, NTT, Kalimantan

Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua menunjukkan, bahwa pertumbuhan investasi swasta daerah yang tinggi pada propinsi-propinsi tersebut memberikan pengaruh kepada tingginya pertumbuhan ekonomi daerah pada propinsi-propinsi tersebut.

**Tabel 4.8**  
**Pembagian Propinsi Berdasarkan**  
**Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Investasi Swasta Daerah**  
**di Indonesia**

		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	
		Tinggi*	Rendah**
Pertumbuhan Investasi Swasta Daerah	Tinggi*	Riau NTB NTT Kalbar Kaltim Sultra Papua Sulsel	Sumut DI Yogya Kalteng Sulut Maluku
	Rendah*	Jambi Lampung Kalsel Sulteng	Aceh Sumbar Sumsel Bengkulu Jakarta Jabar Jateng Jatim Bali

Ket: \* = > rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia  
\*\* = < rata-rata pertumbuhan 26 propinsi di Indonesia

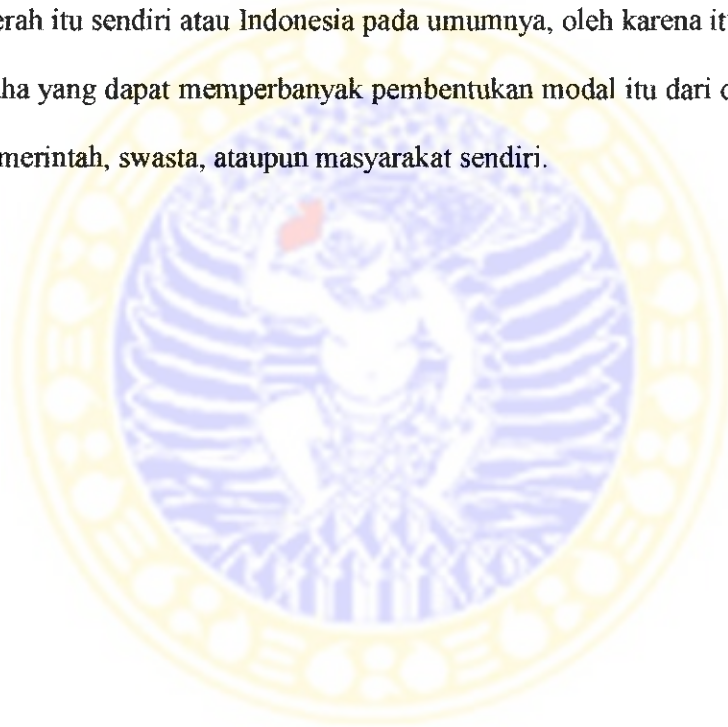
Selain terkonsentrasi pada pertumbuhan yang tinggi, pengaruh pertumbuhan investasi swasta daerah yang rendah dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah juga nampak jelas pada propinsi-propinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pertumbuhan investasi swasta daerah yang rendah pada propinsi-propinsi tersebut memberikan pengaruh kepada rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah pada propinsi-propinsi tersebut.

Pengaruh positif pertumbuhan investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlihat pada propinsi Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah yang memiliki pertumbuhan investasi swasta daerah yang rendah, namun dilain pihak pertumbuhan ekonomi daerahnya termasuk tinggi. Pengaruh yang menyimpang dari hasil penelitian juga terlihat dari propinsi Sumatera Utara, DI Yogya, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku yang memiliki tingkat pertumbuhan investasi swasta daerah yang tinggi, namun tingkat pertumbuhan ekonominya termasuk rendah.

Secara umum nampak bahwa sebagian besar propinsi-propinsi terkonsentrasi pada jalur yang tepat yaitu pada tingkat pertumbuhan investasi swasta daerah yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi pula, sebaliknya juga terlihat pada pertumbuhan investasi swasta daerah yang rendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah pula. Hal ini menunjukkan pengaruh dari pertumbuhan investasi swasta daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terbukti adanya.

Menurut Hirawan (1992: 187) bahwasanya kebijaksanaan menarik investasi atau penanaman modal oleh pihak swasta merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil untuk mencukupi kebutuhan akan dana pembiayaan pembangunan. Investasi swasta lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang bisa memberikan nilai tambah bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang terkait antara investasi swasta daerah dengan pertumbuhan perekonomian daerah karena investasi swasta daerah juga merupakan salah satu *engine of growth* bagi perekonomian suatu daerah. Investasi swasta daerah juga merupakan langkah awal kegiatan perekonomian daerah yang berkesinambungan.

Setiap daerah di Indonesia selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerahnya. Pemerintah telah berusaha untuk mendorong laju investasi guna mendorong perekonomian melalui berbagai deregulasi investasi dan juga mengeluarkan kebijaksanaan penyederhanaan prosedur perijinan penanaman modal yang digariskan dalam Intruksi Presiden No. 5/Tahun 1984, Surat Keputusan Ketua BKPM No. 10/Tahun 1985. Situasi penanaman modal tidak terlepas dari gejala ketidakmerataan sama halnya dengan kondisi ekonomi daerah itu sendiri atau Indonesia pada umumnya, oleh karena itu diperlukan berbagai usaha yang dapat memperbanyak pembentukan modal itu dari dalam negeri baik oleh pemerintah, swasta, ataupun masyarakat sendiri.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan pada bab empat, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel konsumsi pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah, dan investasi swasta daerah secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia selama periode 1996-2003.
2. Konsumsi pemerintah daerah terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Meningkatnya konsumsi pemerintah daerah sebesar 1% berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebesar 1,218523%.
3. Investasi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Meningkatnya investasi pemerintah daerah sebesar 1% berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebesar 0,612499%.
4. Investasi swasta daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Meningkatnya investasi swasta daerah sebesar 1% berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,077286. Konsistensi dengan teori dilihat dari

tanda koefisien variabel terjadi pada semua variabel penjelas, yaitu  $C_g$ ,  $I_g$ , dan  $I_p$ .

## 5.2 Saran

1. Melihat pengaruh dari konsumsi pemerintah yang lebih besar daripada investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, maka sudah selayaknya variabel ini dipertimbangkan sebagai salah satu variabel determinan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena konsumsi pemerintah sangat penting perannya untuk memotivasi aparatur pemerintahan karena sebagian besar konsumsi pemerintah digunakan untuk membiayai penyediaan dan peningkatan fasilitas kerja, kapasitas serta motivasi kerja segenap aparatur pemerintahan.
2. Investasi pemerintah diarahkan untuk proyek-proyek yang produktif supaya nilai produksinya lebih besar dari nilai investasinya, selain itu juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas modal manusia yang peranannya besar dan strategis terhadap pertumbuhan perekonomian.
3. Guna mendorong investasi swasta maka investasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana baik dalam bentuk fisik maupun sosial masih sangat perlu dilakukan untuk menarik para investor menanamkan modalnya. Penyediaannya selayaknya lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang belum tersentuh oleh swasta.
4. Beberapa kelemahan pada penelitian ini yang dapat teridentifikasi, antara lain spesifikasi variabel terkait dengan fungsi yang digunakan. Variabel angkatan kerja mungkin perlu dimasukkan ke dalam model pertumbuhan seperti yang



dilakukan oleh Rahayu (2000) atau mungkin variabel-variabel stabilitas politik dan sosial. Variabel pengeluaran pemerintah bisa lebih spesifik pada modal manusia seperti Kweka dan Morrissey (1999). Dewasa ini justru lebih menekankan pengukuran modal manusia pada bidang tertentu misalkan bidang pendidikan ataupun kesehatan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achir, Azmy, 1975. *Masalah Pengurusan Keuangan Negara*, Bandung: CV Yulianti
- Baltagi, Badi H., 1999. *Econometrics*. Edisi ke-2, USA: Springer
- Barro, Robert j., 1990. *Government spending in a simple model of endogenous growth*, *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5
- Barro, R.J., dan Sala-i-Martin, 1995. *Economic Growth*, McGraw-Hill, New York.
- Budiono, 1994. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi III. BPFE: Yogyakarta.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Folster, S. dan M. Henrekson, 1990. *Growth and the public sector: a critique of the European*, *Journal of Political Economy*, 15: 2.
- Gregory, Mankiw N, 1999. *Teori Makro Ekonomi*, Terjemahan: Imam Murmawan, SE, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Grier, K.B., dan G. Tullock, 1987, *An empirical Analysis of Cross National Economic Growth 1950-1980*, Working Paper, California State Institute of Technology.
- Griffith, William E., R Carter Hill, dan George G Judge, 1993. *Learning and Practicing Econometrics*, USA: John Wiley and Sons.
- Gujarati, Damodar, 1988. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan: Sumarmo Zain, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, edisi pertama, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Hirawan, Susiyati B., 1992. *Pembiayaan Pembangunan Daerah Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hsiao, Cheng, 1995. *Analysis of Panel Data*, *Econometric Society Monographs*, Cambridge University Press.

- Henrekson, M., 1993, *Wagner law – a spurious relationship*, Public Finance, vol. 48.
- Ibrahim, H. Mansor, 2000. *Public and Private Capital formation and Economic Growth in Malaysia*, Journal of Economic Management 8, The International Islamic University Malaysia.
- Jhingan, M. L., 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan oleh D. Guritno. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kunarjo, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta: UI Press
- Kweka, Oliver dan Morrissey, 1999. *Government Spending and Economic Growth Empirical Evidence from Tanzania*, University of Nottingham
- Landau, D., 1983. *Government Expenditure and Economic growth: A Cross Country Study*, Southern Economic Journal, Vol. 49.
- Lindauer, D. dan A. Valenchik, 1992. *Government Spending in Developing Countries: Trends, Causes and Determinants*, World Bank Research Observer.
- Lucas, R.E., Jr., 1988. *On the Mechanics of Economic Development*, Journal of Monetary Economics, Vol 22.
- Mankiw, N. Gregory, David Romer dan David N. Weil, 1992. *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*, Quarterly Journal of Economics, Vol. CVII
- Munnell, Alicia H., 1990a. *Why has Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment*, "Federal Reserve Bank of Boston, New England Economic Review, Jan./Feb.
- Musgrave, 1984. *Public Finance Theory and Practice*, Fourth Edition, Mc Graw Hill. Inc. Singapore.
- Rahayu, Siti Aisyah Tri, 2000. *Peranan Sektor Publik Lokal dan Swasta dalam pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan yang terjadi di Indonesia*, Empirika, Nomor 27
- Ram, R., 1986. *Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross section and time series*. American Economic Review, Vol. 76.

- Rebelo, S., 1991, *Long-run Policy Analysis and Long-run Growth*, Journal of Political Economy, Vol. 99.
- Romer, P.P., 1986. *Increasing Returns and Long-Run Growth*, Journal of Political Economy, Vol. 94.
- Rosyidi, Suherman, 2001. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Makro dan Mikro*, Cetakan Pertama, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, P.A., dan William Nordhaus, 1992. *Makroekonomi*, Edisi keempat belas. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Sala-i-Martin, X.,1997. *I just ran two million regressions*, American Economic Review, Vol. 87.
- Stem, Nicholas, 1991. *The Determinants of Growth*, The Economic Journal, Vol. 101.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1998. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suparmoko, M dan Irawan, 2002. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE
- Tarmidi, Lepi T, 1999. *Krisis Moneter di Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 1
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 Edisi Ketujuh. Bumi Aksara

**Lampiran I****Hasil Estimasi Regresi dengan Metode GLS**

Dependent Variable: GROWTH?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Date: 05/05/06 Time: 19:20  
 Sample: 1996 2003  
 Included observations: 8  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 208  
 Convergence achieved after 11 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.029766	0.013673	2.177002	0.0306
IP?	0.077286	0.041190	1.876308	0.0620
IG?	0.612499	0.182344	3.359023	0.0009
CG?	1.218523	0.164957	7.386921	0.0000
DUMMY?	-0.056322	0.007027	-8.015587	0.0000
<b>Weighted Statistics</b>				
R-squared	0.490192	Mean dependent var	0.105876	
Adjusted R-squared	0.480146	S.D. dependent var	0.198795	
S.E. of regression	0.143333	Sum squared resid	4.170508	
F-statistic	48.79720	Durbin-Watson stat	1.851601	
Prob(F-statistic)	0.000000			
<b>Unweighted Statistics</b>				
R-squared	0.044788	Mean dependent var	0.032078	
Adjusted R-squared	0.025966	S.D. dependent var	0.145231	
S.E. of regression	0.143333	Sum squared resid	4.170513	
Durbin-Watson stat	2.080100			

## Lampiran 2

Tabel PDRB di Indonesia menurut Propinsi Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rp)

No	DAERAH	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	N.ACEH DARUSSALAM	11463291	11444454	10384957	9949896	9129358	9237840	9272598	9586814
2	SUMATERA UTARA	23714738	25065405	22332690	22910086	24016595	24911046	25925361	27071252
3	SUMATERA BARAT	7609545	8000663	7458576	7577036	7868238	8153962	8505563	8886574
4	RIAU	19808076	8559152	8404350	8753870	21633022	22552524	23544880	24651073
5	JAMBI	3145342	3268452	3091527	3181314	3354149	3551168	3707172	3872380
6	SUMATERA SELATAN	13521163	14207488	13239321	13659787	12025512	12312419	12775365	13352812
7	BENGKULU	1693619	1740586	1631372	1677279	1744250	1814479	1892935	1989882
8	LAMPUNG	6914210	7201338	6701179	6874387	7174254	7433265	7817341	8263918
9	DKI JAKARTA	66164802	69543446	57380517	57215223	59694419	61868256	64338830	67162700
10	JAWA BARAT	68243530	71568924	58847841	60200705	55660205	58311798	60594235	63179491
11	JAWA TENGAH	41862204	43129839	38065273	39394514	40941667	42305176	43775693	45605369
12	DI YOGYAKARTA	5111563	5292555	4700642	4742963	5017709	5186666	5395052	5615557
13	JAWA TIMUR	61752469	64853576	54398897	55393854	56856521	58750180	60754056	63252166
14	BALI	7141773	7556533	7250948	7299401	7521841	7777071	8021669	8314458
15	NUSA TENGGARA BARAT	3195295	3363240	3259977	3362136	4377225	4770689	4950935	5104327
16	NUSA TENGGARA TIMUR	2685357	2836328	2758906	2834212	2952372	3103059	3287925	3480903
17	KALIMANTAN BARAT	6714068	7219744	6879361	7066058	7274000	7409948	7559183	7781875
18	KALIMANTAN TENGAH	4036155	4290178	3993187	4045946	4092515	4203919	4341376	4552231
19	KALIMANTAN SELATAN	5956571	6235962	5890821	6042961	6424665	6665209	6920356	7256171
20	KALIMANTAN TIMUR	19792193	11407648	11090280	11546160	22384086	23513547	24622493	25211690
21	SULAWESI UTARA	3574698	3767016	3677889	3889665	3220688	3357568	3490692	3671883
22	SULAWESI TENGAH	2212649	2316865	2225138	2287380	2383700	2507463	2643128	2808637
23	SULAWESI SELATAN	9485863	9893420	9366229	9631076	10101948	10603662	11092996	11690525
24	SULAWESI TENGGARA	1561002	1644024	1549033	1588457	1672193	1766340	1880970	2016261
25	MALUKU	2981248	3085740	2902761	2197398	1297502	1276998	1315340	1361653
26	PAPUA	6944927	7501814	8546232	8162153	8338145	8202084	8915560	9179748
	TOTAL	407286351	404994390	356027904	361483917	387156779	401546336	417341704	434920350

Sumber : PDRB menurut propinsi se- Indonesia, BPS

## Lampiran 3

Tabel Konsumsi Pemerintah Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996 – 2003 (Juta Rp)

No	DAERAH	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	N. ACEH DARUSSALAM	162118	177897	131806	91610.9	89933	205304	312631	414904
2	SUMATERA UTARA	482878	550192	337666	166552	213747	489414	715916	588286
3	SUMATERA BARAT	77864.6	89598.7	88985.5	99118.2	112711	208804	313880	321458
4	RIAU	106018	129162	143553	191345	256666	359236	527858	612251
5	JAMBI	39452.1	46963.3	47752	57205.7	68370.6	138180	223658	283808
6	SUMATERA SELATAN	117171	121534	150674	145658	116925	271526	421655	524269
7	BENGKULU	36791.5	42155.8	48562.3	55139.7	55572.2	109954	148679	180522
8	LAMPUNG	82142.3	91130.1	84252.1	94328.2	112669	194174	306130	373094
9	DKI JAKARTA	1568561	1706556	1536003	2071709	2383277	3788876	5379685	5651931
10	JAWA BARAT	1139255	1142209	649778	486207	736611	1280258	1584621	1903043
11	JAWA TENGAH	1177227	1201041	671630	421834	552669	925172	1292949	1613624
12	DI YOGYAKARTA	163576	156635	107613	88918.7	108588	217831	318415	400301
13	JAWA TIMUR	1145624	1314171	753012	308391	387949	588515	913669	1188518
14	BALI	71118.9	84456.7	79755.1	119747	143449	288597	456408	415781
15	NUSA TENGGARA BARAT	39070.8	45322.9	47927.2	55546.3	87369.3	181635	229825	249046
16	NUSA TENGGARA TIMUR	44127.8	52921.8	51970	57781.2	62834	124180	186053	305479
17	KALIMANTAN BARAT	55253.1	63108.8	68292.7	87373	105500	196446	298323	341431
18	KALIMANTAN TENGAH	120500	128754	93597.3	79043	88479.1	132692	175795	229997
19	KALIMANTAN SELATAN	113019	105816	91422.9	127235	157541	240504	288753	310669
20	KALIMANTAN TIMUR	129351	148980	191940	297946	324867	618201	625402	956964
21	SULAWESI UTARA	54135.5	61438.3	69628.6	86185.6	83575.5	179123	275151	326204
22	SULAWESI TENGAH	132254	132002	77920.6	53743.1	72317.9	138438	210543	276218
23	SULAWESI SELATAN	95787.4	116362	120378	146587	157060	263655	341874	399783
24	SULAWESI TENGGARA	29763.6	36321.5	40305.4	51233.3	61534.9	110327	164540	213241
25	MALUKU	39414.2	48567.1	50818.9	57120.5	57752.8	107501	155749	218325
26	PAPUA	149091	165439	210288	261939	239543	438741	812233	1000210

Sumber : Statistik Indonesia, BPS (diolah)

## Lampiran 4

Tabel Investasi Pemerintah Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996 – 2003 (Juta Rp)

No	DAERAH	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	N.ACEH DARUSSALAM	77234.7	87166.3	74350	119317	162582	203975	789348	1143341
2	SUMATERA UTARA	157971	190169	162510	205724	224106	252092	316073	535215
3	SUMATERA BARAT	66522.8	76580.2	68505	80855	111102	128639	132012	194131
4	RIAU	147352	154795	155867	209157	267128	580427	1042776	1323421
5	JAMBI	73183.5	76180.3	71529	84054	93737.4	67855.8	99991.3	124651
6	SUMATERA SELATAN	106375	118619	105029	128341	156362	195519	256462	353574
7	BENGKULU	48839	55387.8	50831	59649	72008.3	49115.4	43096	77032.8
8	LAMPUNG	73170	75280.9	74722	94841	114169	120941	182471	255516
9	DKI JAKARTA	1140887	1183070	531004	549208	955470	1770102	2941896	4773880
10	JAWA BARAT	472703	479437	333397	254372	363701	599649	833498	1096265
11	JAWA TENGAH	230045	251713	198586	224832	303286	354134	702046	1021899
12	DI YOGYAKARTA	44970.1	49903.4	45954	48989	72565.2	66287.4	69282	69369.5
13	JAWA TIMUR	385381	435093	344446	377894	455745	927811	1675065	1874903
14	BALI	81514.7	93501.6	83328	82583	110971	172817	254480	290320
15	NUSA TENGGARA BARAT	56347.3	67159.2	70715	92644	118966	104648	118433	141052
16	NUSA TENGGARA TIMUR	72572.1	77006.9	74246	103416	109533	68579.6	101853	106335
17	KALIMANTAN BARAT	77119	85407.4	81741	106598	134464	117896	123559	168296
18	KALIMANTAN TENGAH	95060.6	102621	93144	118813	142498	161930	145721	185654
19	KALIMANTAN SELATAN	60666.9	76758.2	95306	119787	120323	126299	194655	233830
20	KALIMANTAN TIMUR	123699	135941	122363	163101	220087	465878	846428	1332844
21	SULAWESI UTARA	60170.4	64931.9	62425	73236	87250.1	45029.1	83227.2	92602.5
22	SULAWESI TENGAH	65613.3	75539.8	75128	92929	106023	69840.3	46183	70397.2
23	SULAWESI SELATAN	96474	119864	125359	127872	153128	178490	293607	340328
24	SULAWESI TENGGARA	60873	64561.7	65812	79343	99023.2	65507.3	66981.1	115440
25	MALUKU	68386.7	72439.5	68562	75137	87310	75698.8	77987.2	159906
26	PAPUA	107823	119950	119537	161996	218606	186428	865987	1374565

Sumber : Statistik Indonesia, BPS (diolah)



## Lampiran 5

Tabel Investasi Swasta Daerah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1996 – 2003

No	DAERAH	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	N.ACEH DARUSSALAM	1519953	1498432	1355661	1181476	1038107	863177.1	336794.3	34918.56
2	SUMATERA UTARA	6417460	5906597	4166013	4737127	4950463	5528135	5526174	5441571
3	SUMATERA BARAT	1899392	2043363	1777216	1478618	1470435	1470344	1487995	1480695
4	RIAU	4594691	2371280	2334486	2371660	5228754	5278560	4929111	4895384
5	JAMBI	910733.5	922372.7	601883.1	364599.9	489240.6	604997.2	588320.8	586428.8
6	SUMATERA SELATAN	4545054	4780121	3371564	3468542	2373158	2407862	2472923	2468650
7	BENGKULU	522228	278694.2	168333.3	143409.3	138833.7	166479.6	179662	154196.2
8	LAMPUNG	2392832	2511800	1499899	1404786	1526791	1606915	1563100	1667778
9	DKI JAKARTA	31559576	32565832	20889705	20427470	20553753	20176963	19536521	18164602
10	JAWA BARAT	19467145	15698708	12830754	12269407	8620685	7301276	8567796	9455324
11	JAWA TENGAH	9778754	9024851	7596706	5964536	6264099	6575307	6443229	6474209
12	DI YOGYAKARTA	1349783	1359466	1065840	1115276	1266054	1318871	1420856	1543729
13	JAWA TIMUR	17707698	18642911	12035337	10985572	11501467	11071185	10392396	10283064
14	BALI	1769837	1692461	1227000	1234349	1223649	1168596	1101300	1077846
15	NUSA TENGGARA BARAT	898289.7	935343.8	1637864	917648.4	855350.5	927224	938656.3	960989.9
16	NUSA TENGGARA TIMUR	644264.9	559421.1	451565.2	424695.9	458812.8	534277.4	530577.7	566503.3
17	KALIMANTAN BARAT	2001092	2220531	2012064	1951674	2010097	1917937	1805287	1874222
18	KALIMANTAN TENGAH	1463857	1524445	1404785	1501087	1427363	1324229	1357531	1403978
19	KALIMANTAN SELATAN	1374020	1842041	1013408	885136.1	1053774	1069002	892362.6	820583.2
20	KALIMANTAN TIMUR	4676711	2747574	2853540	2910011	4210849	4828000	4598089	4595983
21	SULAWESI UTARA	1260619	755629.1	507918.7	359320.9	776104.9	860882.9	898594.8	716807.5
22	SULAWESI TENGAH	559327.7	509017.2	405086.2	357343.3	362587.6	418178.7	462499	464373.8
23	SULAWESI SELATAN	2160715	2590143	2407813	2436458	2242972	2269940	2262533	2354973
24	SULAWESI TENGGARA	461054	463211.3	374199.4	366482.9	374245.8	419374.7	456047.9	450133.2
25	MALUKU	760750.3	737546.5	569402.8	-28162.3	-61185	-47930.8	-42255.22	-122184
26	PAPUA	2401057	2656607	2448779	2177843	2466593	2801360	2447575	2048217

Sumber : PDRB menurut propinsi se- Indonesia, BPS

## Lampiran 6

## Data Input Regresi

PROPINSI	TAHUN	G	IP	IG	CG	D
N.ACEH DARUSSALAM	1996	0.0247274	0.13587	0.006904	0.001062	0
	1997	-0.001643	0.13072	0.007604	0.001513	0
	1998	-0.092577	0.11846	0.006497	-0.00329	1
	1999	-0.041893	0.11377	0.011489	-0.00281	1
	2000	-0.082467	0.10433	0.01634	-0.00018	1
	2001	0.0118828	0.09455	0.022343	0.02851	1
	2002	0.0037626	0.03646	0.085447	0.017626	1
	2003	0.0338865	0.00377	0.123303	0.014158	1
SUMATERA UTARA	1996	0.090142	0.295	0.007262	0.001474	0
	1997	0.0569548	0.24907	0.008019	0.00306	0
	1998	-0.109023	0.16621	0.006483	-0.00584	1
	1999	0.0258543	0.21212	0.009212	-0.00368	1
	2000	0.0482979	0.21608	0.009782	0.002522	1
	2001	0.037243	0.23018	0.010497	0.025338	1
	2002	0.0407175	0.22184	0.012688	0.01278	1
	2003	0.0441996	0.20989	0.020644	-0.00387	1
SUMATERA BARAT	1996	0.0787257	0.26926	0.00943	0.001397	0
	1997	0.0513983	0.26853	0.010064	0.001688	0
	1998	-0.067755	0.22213	0.008562	-0.00008	1
	1999	0.0158824	0.19824	0.01084	0.00149	1
	2000	0.0384322	0.19406	0.014663	0.001964	1
	2001	0.0363136	0.18687	0.016349	0.021832	1
	2002	0.0431203	0.18249	0.01619	0.018571	1
	2003	0.0447955	0.17409	0.022824	0.000873	1
RIAU	1996	0.0545579	0.24462	0.007845	0.001225	0
	1997	-0.567896	0.11971	0.007815	0.003294	0
	1998	-0.018086	0.27275	0.018211	0.001903	1
	1999	0.041588	0.28219	0.024887	0.007277	1
	2000	1.4712524	0.59731	0.030515	0.00405	1
	2001	0.0425046	0.244	0.026831	0.006366	1
	2002	0.044002	0.21856	0.046238	0.010523	1
	2003	0.0469823	0.20792	0.056208	0.003971	1
JAMBI	1996	0.0881285	0.31507	0.025318	0.003213	0
	1997	0.0391404	0.29325	0.02422	0.002736	0
	1998	-0.054131	0.18415	0.021885	0.000259	1
	1999	0.0290429	0.11794	0.027189	0.00356	1
	2000	0.0543282	0.15379	0.029465	0.003978	1
	2001	0.0587389	0.18037	0.02023	0.03973	1
	2002	0.0439303	0.16567	0.028157	0.037321	1

	2003	0.0445644	0.15819	0.033624	0.019711	1
SUMATERA SELATAN	1996	0.080331	0.36315	0.008499	0.001126	0
	1997	0.0507593	0.35353	0.008773	0.00032	0
	1998	-0.068145	0.23731	0.007393	0.002729	1
	1999	0.0317589	0.26199	0.009694	-0.00035	1
	2000	-0.119641	0.17373	0.011447	-0.00192	1
	2001	0.0238582	0.20023	0.016259	0.029159	1
	2002	0.0375999	0.20085	0.02083	0.018249	1
	2003	0.0452	0.19324	0.027676	0.009555	1
BENGKULU	1996	0.0602719	0.32694	0.030575	0.005399	0
	1997	0.0277317	0.16456	0.032704	0.003531	0
	1998	-0.062746	0.09671	0.029203	0.004524	1
	1999	0.0281401	0.08791	0.036563	0.004453	1
	2000	0.0399284	0.08277	0.042932	0.00025	1
	2001	0.0402632	0.09544	0.028158	0.0593	1
	2002	0.0432389	0.09902	0.023751	0.027662	1
	2003	0.0512152	0.08146	0.040695	0.01943	1
LAMPUNG	1996	0.0795325	0.3736	0.011424	0.002505	0
	1997	0.0415272	0.36328	0.010888	0.001385	0
	1998	-0.069454	0.20828	0.010376	-0.00095	1
	1999	0.0258474	0.20963	0.014153	0.001641	1
	2000	0.0436209	0.2221	0.016608	0.003053	1
	2001	0.0361028	0.22398	0.016858	0.018897	1
	2002	0.0516699	0.21028	0.024548	0.022579	1
	2003	0.0571265	0.21334	0.032686	0.009876	1
DKI JAKARTA	1996	0.0909519	0.52037	0.018811	0.004739	0
	1997	0.0510641	0.49219	0.017881	0.002159	0
	1998	-0.174897	0.30038	0.007636	-0.00268	1
	1999	-0.002881	0.356	0.009571	0.012629	1
	2000	0.0433311	0.35924	0.0167	0.006004	1
	2001	0.0364161	0.338	0.029653	0.036118	1
	2002	0.0399328	0.31578	0.047551	0.035107	1
	2003	0.0438906	0.28233	0.074199	0.004259	1
JAWA BARAT	1996	0.0920509	0.31152	0.007564	0.001453	0
	1997	0.0487283	0.23004	0.007025	0.00004	0
	1998	-0.177746	0.17928	0.004658	-0.00476	1
	1999	0.0229892	0.20849	0.004323	-0.00203	1
	2000	-0.075423	0.1432	0.006041	0.006816	1
	2001	0.0476389	0.13118	0.010773	0.016204	1
	2002	0.0391419	0.14693	0.014294	0.006217	1
	2003	0.042665	0.15604	0.018092	0.006053	1
JAWA TENGAH	1996	0.073006	0.25065	0.005896	0.003498	0
	1997	0.0302811	0.21558	0.006013	0.000563	0
	1998	-0.117426	0.17614	0.004604	-0.00778	1

## Lampiran 7

Tabel Distribusi t ( $\alpha = 10\%$ )

df \ Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,005
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,010
1	1,000	3,078	6,314	12,706	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	3,055
13	0,694	1,350	1,771	2,160	3,012
14	0,692	1,345	1,761	2,145	2,977
15	0,691	1,341	1,753	2,131	2,947
16	0,690	1,337	1,746	2,120	2,921
17	0,689	1,333	1,740	2,110	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,878
19	0,688	1,328	1,729	2,093	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,750
40	0,681	1,303	1,840	2,021	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,660
120	0,677	1,289	1,580	1,980	2,167
~	0,674	1,282	1,645	1,960	2,576

## Lampiran 8

Tabel Distribusi F ( $\alpha = 10\%$ )

n \ m	1	2	3	4	5	6
1	39,86	49,50	53,59	55,83	57,24	58,20
2	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33
3	5,54	5,46	5,39	5,34	5,31	5,28
4	4,54	4,32	4,19	4,11	4,05	4,01
5	4,06	3,78	3,62	3,52	3,43	3,40
6	3,78	3,46	3,29	3,18	3,11	3,05
7	3,59	3,26	3,07	2,96	2,88	2,83
8	3,46	3,11	2,92	2,81	2,73	2,67
9	3,36	3,01	2,81	2,69	2,61	2,55
10	3,29	2,92	2,73	2,61	2,52	2,46
11	3,23	2,86	2,66	2,54	2,45	2,39
12	3,18	2,81	2,61	2,48	2,39	2,33
13	3,14	2,76	2,56	2,43	2,35	2,28
14	3,10	2,73	2,52	2,39	2,31	2,24
15	3,07	2,70	2,49	2,36	2,27	2,21
16	3,05	2,67	2,46	2,33	2,24	2,18
17	3,03	2,64	2,44	2,31	2,22	2,15
18	3,01	2,62	2,42	2,29	2,20	2,13
19	2,99	2,61	2,40	2,27	2,18	2,11
20	2,97	2,59	2,38	2,25	2,16	2,09
21	2,96	2,57	2,36	2,23	2,14	2,08
22	2,95	2,56	2,35	2,22	2,13	2,06
23	2,94	2,55	2,34	2,21	2,11	2,05
24	2,93	2,54	2,33	2,19	2,10	2,04
25	2,92	2,53	2,32	2,18	2,09	2,02
26	2,91	2,52	2,31	2,17	2,08	2,01
27	2,90	2,51	2,30	2,17	2,07	2,00
28	2,89	2,50	2,29	2,16	2,06	2,00
29	2,89	2,50	2,28	2,15	2,06	1,99
30	2,88	2,49	2,28	2,14	2,05	1,98
40	2,84	2,44	2,23	2,09	2,00	1,93
60	2,79	2,39	2,18	2,04	1,95	1,87
120	2,75	2,35	2,13	1,99	1,90	1,82
~	2,71	2,30	2,08	1,94	1,85	1,77

n = degrees of freedom for denominator

m = degrees of freedom for numerator